

FAKTOR PENENTU YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN *NON-TARIFF BARRIERS* (NTBs) TERHADAP PENURUNAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR PERDAGANGAN INDONESIA KE JEPANG TAHUN 2008-2015

Skripsi

**Oleh:
Galih Romadhona**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

FAKTOR PENENTU YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN *NON-TARIFF BARRIERS* (NTBs) TERHADAP PENURUNAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR PERDAGANGAN INDONESIA KE JEPANG TAHUN 2008-2015

Oleh

Galih Romadhona

Kerjasama *Non-Tariff Barriers* (NTBs) antara Indonesia dengan Jepang seharusnya dapat meningkatkan intensitas perdagangan kedua negara, namun hal yang terjadi justru sebaliknya, yakni terjadinya penurunan volume dan nilai ekspor perdagangan Indonesia ke Jepang sejak tahun 2008 hingga 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mendeskripsikan faktor penentu yang mempengaruhi kebijakan NTBs terhadap penurunan volume dan nilai ekspor perdagangan Indonesia ke Jepang pada kurun waktu 2008-2015. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan data yang terdapat dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder, bersumber pada data utama yaitu *Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership* (IJEPA) serta publikasi resmi oleh pemerintah Indonesia serta Jepang dalam bentuk data *report*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa perspektif dan konsep, yaitu *Neoliberalisme*, kebijakan luar negeri dan NTBs. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Negative Case* dengan tiga bagian proses analisis data yang disebut *Flow Model*. Penelitian ini dilihat melalui tiga fokus utama, yaitu perubahan *terms of trade* (ToT), dinamika pasar global serta kondisi GDP riil negara pengimpor (Jepang). Berdasarkan hasil penelitian, tiga fokus tersebut memiliki dampak yang menyebabkan munculnya tindakan *safeguards* oleh Indonesia, kebijakan kenaikan pajak pendapatan dan konsumsi oleh Jepang atas respon tindakan *safeguards* Indonesia, skema *Voluntary Export Restraint* (VER) serta belum adanya langkah konkrit yang diambil kedua negara dalam menangani masalah tersebut.

Kata kunci: *Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership*, IJEPA, *Non-Tariff Barriers*, NTBs, kebijakan perdagangan.

ABSTRACT

THE DETERMINANT FACTORS OF NON-TARIFF BARRIERS POLICY (NTBs) ON DECREASING VOLUME AND VALUE OF INDONESIAN TRADE EXPORT TO JAPAN 2008-2015

By

Galih Romadhona

Non-tariff Barriers (NTBs) bilateral relations between Indonesia and Japan supposed to increased Indonesia-Japan trade intensity, nonetheless Indonesia volume and value trade export to Japan is actually decreased. This study aimed to analyze and describe the influence factors of NTBs policy on decreasing volume and value of Indonesian trade export to Japan 2008-2015. Used descriptive qualitative research method, this study provides data specifically dominated by secondary data, that were mainly by the fundamental data i.e. Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership (IJEPA) and also official data reports published by Indonesian and Japanese governments. Several perspectives and concepts are used to analyze this case: Neoliberalism, foreign policy and Non-Tariff Barriers policy (NTBs). This study used Negative Case analytical method with three steps data analytical process Flow Model. This study is seen through three main focuses: Terms of Trade (ToT), global market dynamics and Japan real GDP condition. These three focuses are indicated has roles in decreasing Indonesia-Japan trade intensity related to NTBs. This study shows those three factors have an impact that has led to the Indonesian emergence of safeguards, Japan's taxation policy in a response to the Indonesian safeguards, Voluntary Export Restraint Scheme (VER) and the lack of concrete steps taken by both countries in dealing with this problem.

Keywords: Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership, IJEPA, Non-Tariff Barriers, NTBs, trade policy.

FAKTOR PENENTU YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN *NON-TARIFF BARRIERS* (NTBs) TERHADAP PENURUNAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR PERDAGANGAN INDONESIA KE JEPANG TAHUN 2008-2015

**Oleh:
Galih Romadhona**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL (S. Hub. Int)

Pada

**Program Strata Satu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



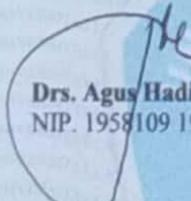
**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **FAKTOR PENENTU YANG
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN *NON-
TARIFF BARRIERS* (NTBs) TERHADAP
PENURUNAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR
PERDAGANGAN INDONESIA KE JEPANG
TAHUN 2008-2015**

Nama Mahasiswa : ***Galih Romadhona***
Nomor Pokok Mahasiswa : **1516071002**
Program Studi : **Hubungan Internasional**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

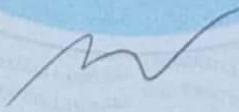
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 1958109 198603 1 002


Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 19920309 201903 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

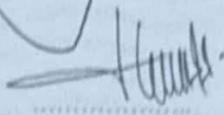
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

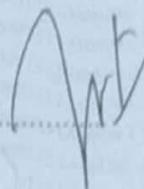
Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.



Sekretaris : Tety Rachmawati, S.I.P., M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing: Dr. Prof. Yulianto, M.S.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Sunief Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 September 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshis@fhsip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fhsip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 September 2019
Yang membuat pernyataan,



Galih Romadhona
NPM 1516071002

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Galih Romadhona. Lahir di Kotabumi pada 6 Februari 1997 yang merupakan anak dari Bapak Sahri dan Ibu Eko Kurnia Sari. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yaitu Sukma Wulan Suci. Penulis telah menempuh jenjang pendidikan di TK IKI PTPN VII unit usaha Tulung Buyut pada 2001-2002. Pada tahun 2003-2009 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kalipapan. Menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Padang Ratu 2009-2012. Menyelesaikan sekolah ditingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kotabumi pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis tercatat dan terdaftar sebagai Mahasiswa Strata-1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung dengan fokus konsentrasi studi Ekonomi Politik Internasional. Selama masa perkuliahan, penulis aktif bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) sebagai *Head of Academic Affairs*. Pada awal tahun 2018 penulis berhasil meraih penghargaan *Write to China 2018 Awardee* yang diadakan oleh *Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)* dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan kemudian penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan (KKN Kebangsaan).

*“You need to be Insane to Create
Your Own Passion, because
Knowledge has no Boundaries.”*

- Galih Romadhona

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Untuk orang tuaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Keluargaku yang memberikan dukungan dan selalu menjadi motivasi Penulis untuk terus berproses;

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor diskusi;

Sahabat-sahabatku yang telah mengisi hari-hariku dan menyemangati untuk pantang menyerah selama ini;

Terakhir, kepada Teman-teman HI Unila angkatan 2015 yang mewarnai dinamika kehidupan perkuliahan Penulis;

Serta untuk Almamaterku tercinta,

Jurusan Hubungan Internasional,

Universitas Lampung.

SANWACANA



Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Faktor Penentu yang Mempengaruhi Kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) terhadap Penurunan Volume dan Nilai Ekspor Indonesia ke Jepang 2008-2015” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua Pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai Pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan dan ridho-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan FISIP, Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk segala kesabaran, bimbingan, waktu dan tenaga yang telah Bapak perkenankan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku Dosen Penguji Skripsi penulis untuk bimbingan, saran, kritik yang telah diberikan terhadap Skripsi ini;
6. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala kesabaran, bimbingan, waktu dan tenaga yang telah Ibu perkenankan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu-ilmu, bimbingan, dan motivasi dalam proses perkuliahan;
8. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional;
9. Kepada Orangtuaku, Bapak Sahri dan Ibu Eko Kurnia Sari yang telah berjuang mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih untuk segalanya yang tidak dapat terhitung jasanya, kalian merupakan kunci kesuksesan dalam hidup ku serta dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada Adikku tercinta dan satu-satunya, Sukma Wulan Suci, Terima kasih atas doa serta dukungan mu selama ini;

11. Seluruh teman-teman WTC 2018 yang telah memotivasi serta menjadi keluarga yang selalu memberikan semangat serta dukungan melalui tawa;
12. Seluruh teman, sahabat serta keluarga Starbucks Lampung (SCP4 dan SC4Z) yang selalu mengajarkan, memotivasi dan menyemangati dalam setiap keadaan, terimakasih pula untuk pelajaran hidup yang telah diberikan;
13. Seluruh teman-temah Strata-1 Hubungan Internasional angkatan 2015 tanpa terkecuali, semoga kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai kita semua; dan
14. Seluruh pihak yang membantu dalam kelancaran dan kesuksesan Skripsi ini.

Bandarlampung, 16 September 2019
Dengan Penuh Rasa Syukur dan Terimakasih,

Galih Romadhona
NPM. 1516071002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR DIAGRAM	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Keilmuan/Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Konseptual	17
2.2.1. Neoliberalisme	17
2.2.2. Kebijakan Luar Negeri.....	19
2.2.3. <i>Non-Tariff Measures</i> (NTMs).....	20
2.3. Kerangka Pemikiran	24
III. METODOLOG PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	27
3.4. Teknik Analisis Data	28

IV.	GAMBARAN UMUM.....	31
4.1.	Kerja sama <i>Non Tariff Measures</i> Indonesia-Jepang...	31
4.1.1.	Sejarah Kerja sama NTMs Indonesia-Jepang..	31
4.1.2.	Kebijakan <i>Non Tariff Measures</i> Indonesia-Jepang 2008-2015.....	41
4.2.	Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia	44
4.2.1.	Dinamika Empat Sektor Indonesia yang Disepakati dalam NTMs.....	47
4.2.1.1.	Sektor Kelautan Indonesia.....	47
4.2.1.2.	Sektor Agrikultur Indonesia.....	48
4.2.1.3.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.....	49
4.2.1.4.	Sektor Bahan Baku atau <i>Raw Material</i> Indonesia	50
4.2.2.	Perkembangan Ekspor Indonesia	53
4.3.	Dinamika Ekonomi-Politik Jepang.....	56
4.3.1.	Dinamika Empat Sektor Jepang yang Disepakati dalam NTMs	62
4.3.1.1.	Sektor Kelautan Jepang.....	62
4.3.1.2.	Sektor Agrikultur Jepang.....	64
4.3.1.3.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Jepang.....	65
4.3.1.4.	Sektor Bahan Baku atau <i>Raw Material</i> Jepang.....	65
4.3.2.	Perkembangan Ekspor Jepang.....	67
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1.	<i>Terms of Trade</i> terhadap Perdagangan Indonesia dan Jepang	70
5.2.	Kondisi GDP riil Negara Pengimpor (Jepang).....	80
5.3.	Dinamika Pasar Global terhadap Perdagangan Indonesia dan Jepang	83
5.4.	Faktor Lain yang Tidak Berpengaruh secara Signifikan	91
5.5.	Evaluasi Hubungan Perdagangan Indonesia dan Jepang.....	94

VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
6.1.	Kesimpulan	97
6.2.	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
4.1.2.1. Jumlah dan Persentase Sektor Kerja sama Indonesia-Jepang 1951-2018	43

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jenis Produk Ekspor Indonesi ke Jepang yang Mengalami Penurunan Pada tahun 2008-2015.....	4
2.1. Penelitian Terdahulu	16
4.1.1.1. Klasifikasi NTMs Menurut UNCTAD dan Kebijakan NTMs Indonesia-Jepang.....	36
4.1.1.2. Produk yang disepakati dalam NTMs Indonesia-Jepang.....	37
4.3. Trend Proyeksi Demografi Jepang.....	62
5.2.2. <i>Consumer Price Index</i> Jepang tahun 2008-2015.....	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1. Total Perdagangan Indonesia-Jepang	4
4.2.1.1. Perbandingan Jumlah Produksi Tangkapan Laut Indonesia 2008-2015.....	47
4.2.1.2. Perbandingan Jumlah Produk Agrikultur Indonesia 2008-2015	48
4.2.1.3. Perbandingan Jumlah Produk Energi dan Sumber daya Mineral Indonesia 2008-2015	49
4.2.1.4. Perbandingan Jumlah Produk Bahan baku atau <i>Raw Material</i> Indonesia 2008-2015.....	51
4.3.1.1. Perbandingan Jumlah Produksi Tangkapan Laut Jepang 2008-2015	63
4.3.1.2. Perbandingan Jumlah Produk Agrikultur Jepang 2008-2015.....	64
4.3.1.3. Perbandingan Jumlah Produk Energi dan Sumber daya Mineral Jepang 2008-2015	65
4.3.1.4. Perbandingan Jumlah Produk Bahan Baku atau <i>Raw Material</i> Jepang 2008-2015.....	67
5.1.1. <i>Consumer Price Index</i> Jepang tahun 2008-2015.....	72
5.1.2. Yen EER pada Akhir Q4 2008-2015	73
5.1.3. Rupiah EER pada Akhir Q4 2008-2015.....	75
5.2.1. Pertumbuhan GDP Jepang.....	80
5.3.1. Dinamika Harga Minyak Dunia.....	84

5.3.2. <i>Highlight</i> Perkembangan Jumlah Sektor Kerja Sama Indonesia-Jepang.....	87
5.3.3. Dinamika Penurunan Volume dan Nilai Ekspor Indonesia Ke Jepang tahun 2008-2015.....	90
5.3.4. Faktor yang Dominan dalam Mempengaruhi Penurunan Volume dan Nilai Ekspor Indonesia Ke Jepang tahun 2008-2015.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.3. Kerangka Pemikiran	25
4.1.1. <i>Timeline</i> Momentum Kerja sama Indonesia-Jepang	35
4.2.2. Persentase Perdagangan Indonesia di Asia	55
4.3.2. Persentase Perdagangan Jepang di Asia.....	69

DAFTAR SINGKATAN

AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AICHR	<i>the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
AJCEP	<i>ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
AVEs	<i>Ad Valorem Equivalent</i>
BI	Bank Indonesia
BIS	<i>the Bank of International Settlements</i>
BOJ	<i>Bank of Japan</i>
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
CEPT Scheme	<i>Common Effective Preferential Tariff Scheme</i>
COM	<i>EU Communication</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
CVDs	<i>Countervailing Duties</i>
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa
DPJ	<i>Democratic Party of Japan</i>
EER	<i>Effective Exchange Rates</i>
EPA	<i>Economic Partnership Agreement</i>
FED	<i>Federal Reserve</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GRIPS	<i>The National Graduate Institute for Policy Studies</i>

GR-IJEP	<i>General Review of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IPTEK	Ilmu Pengentahuan dan Teknologi
IT	<i>Information Technology</i>
IJEP	<i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement</i>
JETRO	<i>Japan External Trade Organization</i>
JFA	<i>Japan Fisheries Association</i>
LDP	<i>Liberal Democratic Party</i>
MAFF	<i>Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries</i>
METI	<i>Ministry of Economy, Trade and Industry</i>
MFN	<i>Most Favoured Nation</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NTMs	<i>Non-Tariff Measures</i>
OEC	<i>The Observatory Economic Complexcity</i>
OECD	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
OPEC	<i>Organizations of the Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PM	Perdana Menteri/ <i>Prime Minister</i>
RoO	<i>Rules of Origin</i>
SAFTA	<i>South Asian Free Trade Agreement</i>
SBIR	<i>Small Business Innovation Research</i>
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SD	Standar Deviasi
SMEs	<i>Small and Medium-sized Enterprises</i>
SPS	<i>Sanitary and Phytosanitary</i>
TAC	<i>Total Allowable Catch</i>
TBT	<i>Technical Barrier to Trade</i>

ToT	<i>Terms of Trade</i>
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
VRA	<i>Voluntary Restraints Agreement</i>
VER	<i>Voluntary Export Restraints</i>
VK	Variasi Koefisien
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan Jepang telah menjalin hubungan kerja sama yang cukup lama, 42 tahun telah berlalu dalam perjalanan kerja sama dagang yang telah di jalin oleh Indonesia dan Jepang. Pada setiap kerja sama yang telah terjalin memiliki tujuan yang jelas dan telah disepakati oleh kedua negara terhitung Indonesia dengan Jepang telah menandatangani 69 perjanjian dalam setiap sektor baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi (Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, 2019), termasuk di dalamnya perjanjian kerja sama dan penerapan kebijakan *Non Tariff Barriers (NTBs)* yang memiliki 16 klasifikasi instrumen yang susai dengan *Tokyo Round* serta kesepakatan negara-negara dalam *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. Tujuan Indonesia dengan Jepang dalam penerapan kebijakan NTBs secara garis besar adalah sama, yakni mempermudah perdagangan kedua negara. Akan tetapi, ada indikasi lain yaitu, adanya kepentingan dari kedua negara.

Jepang memiliki kepentingan dalam mempermudah kelancaran pemasaran produk-produknya ke Indonesia, sedangkan Indonesia memiliki kepentingan dalam perdagangan seperti kesepakatan dalam konteks *two-plus-two (2+2)* atau yang dapat dikatakan sebagai kesepakatan langsung antara kedua negara dan

penghindaran pajak berganda, yakni perjanjian antar kedua negara mengenai perpajakan guna untuk menghindari adanya pajak ganda yang dikenakan terhadap produk ekspor-impor yang justru akan menghambat perekonomian kedua negara dan perjanjian ini biasanya menggunakan prinsip *win-win solution* (Japantimes.co.jp., 2015:1).

Dalam penerapan kerja sama dagang Indonesia dengan Jepang sendiri khususnya dalam bidang kepabeanan yang mencakup *Tariff* dan *Non Tariff Barriers* baru dimulai pada Juli 2005 dan mencapai kesepakatan pada november 2006. Penandatanganan EPA (*Economic Partnership Agreement*) oleh masing-masing pemimpin dilakukan pada Agustus 2007 dan mulai berlaku tepatnya pada tanggal 1 Juli 2008. Perjanjian tersebut terdiri dari Annex 1 hingga 12 yang di dalamnya mencakup berbagai hal seperti, annex 1 membahas tentang *Schedules in relation to Article 20*, annex 2 membahas tentang *Product Specific Rules* dan seterusnya. EPA Jepang dengan Indonesia memiliki berbagai dampak termasuk dalam hal memastikan integritas sistem hukum dan pengoperasiannya serta transparansi yang bersifat wajar dari masing-masing institusi, serta memperbaiki lingkungan investasi. Indonesia juga memiliki sumber daya bawah tanah yang kaya seperti, gas alam dan minyak.

Dengan demikian, EPA menggabungkan sebuah annex tentang sumber energi dan mineral. Sesuai dengan EPA, kedua negara memiliki kegiatan kerja sama dalam industri manufaktur yang ada di 27 proyek pada 14 sektor. Indonesia juga adalah negara kesembilan dalam mitra dagang terbesar Jepang pada tahun 2012 dan negara yang sama-sama memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Indonesia juga memiliki populasi yang sangat besar (sekitar 238 juta orang) di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang kemudian perusahaan Jepang

melihat hal tersebut sebagai peluang dalam akses prioritas ke pasar yang menjanjikan (Japan Ministry of Economy, Trade and Industry, 1).

Menurut Saptanto Subhechanis *et al*, melalui penelitiannya yang berjudul *Impact of Non-Tariff Barriers of Macroeconomics Performance of Fisheris Sector Using Gtap Model Approach* tahun 2017. Ia menjelaskan dalam model simulasi ketiganya mengenai kebijakan NTBs suatu negara dengan negara mitranya, bahwa dalam proses penerapan NTBs tersebut, suatu negara sudah seharusnya setuju terhadap NTBs yang telah ditetapkan bersama dengan negara mitra serta berperan dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Hal tersebut dapat dilakukan apabila pengalokasian sumber daya dalam beberapa hal tidak mungkin diserahkan kepada mekanisme pasar. Peran negara tersebut harus sesuai dengan fungsi pentingnya dalam perekonomian, yaitu fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi. Fungsi tersebut haruslah dijalankan dengan benar oleh pemerintah negara tersebut agar mampu mengurangi terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) seperti adanya monopoli harga serta sebagai pengendali mekanisme pasar. Proses tersebut haruslah dilakukan dengan benar supaya dapat mencapai tujuan dari kebijakan NTBs itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan (ekspor-impor) (Subhechanis, 2017:89).

Adanya perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dapat dilihat dari total perdagangan Indonesia dengan Jepang dari tahun 2008 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat pesat yang hal ini dilihat dari total perdagangan pada tahun tersebut.



Sumber: Kementerian Perdagangan RI, data telah diolah.

Dilihat melalui grafik diatas, pada tahun 2008 total perdagangan mencapai US\$ 42.871.871. Pada tahun 2009, total perdagangan telah mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 34%. Namun, pada tahun berikutnya yakni 2010 total perdagangan mengalami peningkatan besar dengan persentase peningkatan sebesar 50%. Hal ini tidak bertahan lama, di dua tahun selanjutnya yakni tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sebesar 2% pada tahun 2011 dan 13% pada tahun 2012. Pada tahun berikutnya, tahun 2013 total perdagangan Indonesia meningkat pesat sebesar 28% atau sebesar US\$ 46.370.847. Namun, pada dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 13% pada tahun 2014 dan 22% pada tahun 2015. Berikut rincian produk yang mengalami penurunan sesuai data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan telah diolah oleh penulis:

Tabel 1.1. Jenis Produk Ekpor Indonesia ke Jepang yang Mengalami Penurunan Pada tahun 2008-2015 (Ribu US\$)

No	Jenis Produk	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Udang	322.631	304.796	332.615	368.991	364.969	409.639	370.569	306.577
2	Tuna	73.719	85.396	115.441	118.235	111.056	106.763	74.763	57.238
3	Biji Tembaga	1.547.000	2.075.000	2.876.000	1.044.000	958.000	902.000	432.000	1.066.000
4	Kertas	348.000	403.000	448.000	574.000	623.000	477.000	396.000	398.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, data telah diolah.

Dari paparan di atas kita dapat melihat, total perdagangan Indonesia ke Jepang mengalami ketidakstabilan dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Dapat dikatakan ada suatu ketimpangan di dalam kerja sama mitra dagang Indonesia dengan Jepang, yang seharusnya perdagangan tersebut memiliki angka persentase yang stabil terlebih dengan diterapkannya kebijakan NTBs, karena secara teoritis dengan adanya kebijakan NTBs mampu membuat volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang semakin meningkat karena pada dasarnya kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang bersifat menghambat tetapi justru menstimulasi perdagangan, salah satunya dapat dilakukan, yaitu melalui proses penghapusan hambatan teknis atau *technical barriers to trade* (Deardorff dan Stern, 1999:3).

Akan tetapi, faktanya yang terjadi justru sebaliknya perdagangan kedua negara mengalami penurunan yang ditunjukkan melalui total perdagangan Indonesia ke Jepang. Dengan kata lain, ada ketimpangan yang terjadi di dalam perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Seharusnya Indonesia memiliki volume perdagangan yang stabil atau bahkan naik, sebagai pembanding adanya peningkatan volume dan nilai ekspor suatu negara ke negara lain dengan adanya NTBs dapat dilihat pada dua kasus perjanjian NTBs antara India dan Pakistan serta Tiongkok dengan Uni Eropa.

Pertama, Perjanjian NTBs antara India dan Pakistan berlandaskan pada SAFTA (*South Asian Free Trade Agreement*) yang ditandatangani pada tahun 2004 untuk mempromosikan dan meningkatkan perdagangan serta kerja sama ekonomi di kawasan Asia Selatan (Aditi Phadnis dan Kashif Husain, 2011). Dengan adanya kerja sama NTBs antara India dengan Pakistan telah berdampak pada meningkatnya volume perdagangan India ke Pakistan pada rentan tahun 2011-2013 yang mencapai angka volume perdagangan sebesar 192 juta US\$ (Nadia Rehman,

2013:6). Sebelum adanya kerja sama NTBs antara India dan Pakistan, perdagangan kedua negara mengalami angka persentasi yang stagnan pada tahun 2001-2003 yakni hanya sebesar 0,2% saja, setelah adanya dan ditandatanganinya SAFTA pada tahun 2004, persentase volume perdagangan India ke Pakistan naik secara perlahan dan puncak tertinggi pada tahun 2010 yang mencapai angka persentase sebesar 2,2% (*Indian Council Working Paper 363*, 2018:1).

Kedua, dalam kasus perjanjian NTBs Tiongkok ke Uni Eropa yang berlandaskan pada *Agreement on Trade and Economic Cooperation between European Economic Community and the People's Republic of China 1985* dan dibahas lebih dalam mengenai NTBs melalui KTT ke-14 Uni Eropa-Tiongkok pada Februari 2012 serta *EU Communication (COM) 2001* (Zheng Lu *et al*, 2017:15). Sejak adanya kerja sama NTBs yang dilandaskan pada *Agreement on Trade and Economic Cooperation between European Economic Community and the People's Republic of China 1985* serta di bahas lebih lanjut dalam KTT ke-14 Uni Eropa-Tiongkok 2012 dan *EU Communication (COM) 2001*. Volume perdagangan kedua pihak yang berkerja sama, yakni Tiongkok dan Uni Eropa terus meningkat mulai dari tahun 1999 dengan total volume perdagangan Tiongkok ke Uni Eropa sebesar € 72 juta dan terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2010 € 396 juta (*European Commission*, 2018:1).

Dari dua paparan contoh di atas, telah secara jelas memperlihatkan bahwa adanya kerja sama NTBs dapat meningkatkan volume perdagangan negara-negara yang menjalin kerja sama tersebut. Dengan melihat kasus diatas, perjanjian NTBs antara Indonesia dengan Jepang seharusnya dapat membantu tercapainya tujuan kerja sama bilateral kedua negara secara garis besar; yakni mempermudah perdagangan antara Indonesia dengan Jepang tanpa adanya diskriminasi terhadap

ekspor atau impor barang dari kedua negara terlebih, hal ini juga dimaksudkan agar negara-negara yang menjalin kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan berupa peningkatan volume perdagangan. Namun, secara aktual sesuai yang telah dipaparkan pada grafik sebelumnya, perdagangan antara Indonesia dengan Jepang mengalami hal yang tidak seharusnya terjadi, perdagangan antara Indonesia dengan Jepang justru mengalami penurunan yang secara ideal seharusnya mengalami peningkatan.

1.2. Rumusan Masalah

Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Jepang untuk meningkatkan intensitas perdagangan kedua negara melalui kebijakan yang telah di sepakati bersama, yaitu kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) pada nyata tidak mampu meningkatkan arus barang maupun jasa secara volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2008-2015.

Kondisi ini sangat berbeda sekali dengan konsep *Non-Tariff Barriers* (NTBs) yang mengatakan bahwa kebijakan NTBs bukanlah sebuah kebijakan yang sifatnya justru menghambat laju perdagangan antar negara, melainkan kebijakan ini bersifat sebagai stimulus untuk meningkatkan arus perdagangan antar negara yang berakhir pada peningkatan intensitas volume dan nilai ekspor suatu negara ke negara lain. Dengan demikian, adanya ketimpangan yang telah dipaparkan di atas membuat penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

“Mengapa Kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) Indonesia dengan Jepang Berdampak terhadap Penurunan Volume dan Nilai Ekspor Perdagangan Indonesia ke Jepang tahun 2008-2015?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan mengapa kebijakan NTBs antara Indonesia dengan Jepang berdampak pada penurunan volume dan nilai ekspor perdagangan Indonesia ke Jepang pada tahun 2008-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Keilmuan/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dalam menambah ilmu yang dalam hal ini adalah teori-teori hubungan internasional terutama teori tentang perdagangan internasional yang secara khusus mengkaji masalah kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) serta dapat membantu dalam menelaah masalah, menangani isu-isu internasional dan memaksimalkan strategi dalam perdagangan internasional khususnya dalam bidang kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) baik dalam dunia hubungan internasional maupun perdagangan internasional. Dengan begitu, sumbangsih atas penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang akademisi yang mengisi ilmu hubungan internasional dan perdagangan internasional agar dapat mampu mendorong kemajuan perekonomian bangsa secara berkelanjutan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis yang nantinya penulis dapat mengembangkan kemampuannya dalam menganalisis serta memiliki sikap kritis yang di dukung dengan data yang valid mengenai isu-isu internasional. Penulis yang juga nantinya sebagai seorang pembuat kebijakan serta pembuat strategi

nantinya mampu dalam menentukan arah serta sasaran yang akan dituju untuk menyelesaikan sebuah isu tertentu untuk membawa masa depan bangsa dan negara di dunia internasional.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam melihat kondisi internasional serta menentukan arah kebijakannya dalam bidang perdagangan internasional. Dengan ini, diharapkan dapat mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah dalam bidang perdagangan internasional (ekspor-impor) dan dapat menentukan kebijakan yang tepat yang akan diambil serta diharapkan dapat membantu pembangunan ekonomi dalam negeri secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas produk dan industri dalam negeri agar memiliki daya saing tinggi dengan produk dan industri asing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) terhadap perdagangan khususnya ekspor sudah pernah dilakukan oleh Melisa Sunorita (2013) yang berfokus pada kebijakan hambatan non tarif atau NTBs terhadap perdagangan khususnya di pasar Uni Eropa. Pada dasarnya negara-negara memberikan tarif importir, hal ini dapat mempengaruhi proses jual beli antar negara. Secara umum, tarif yang diberlakukan oleh tiap-tiap negara didasarkan pada persetujuan *Most Favoured Nation* (MFN) yakni sebesar 12% pada setiap komoditas.

Non-Tariff Barriers (NTBs) dianggap sebagai salah satu kebijakan yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional terkait persetujuan *Technical Barrier to Trade* (TBT) yang meliputi tiga area kebijakan yakni regulasi teknis yang bersifat wajib (*mandatory technical regulation*), standar yang bersifat voluntir (*voluntary standards*), dan kajian keselarasan (*conformance assesment*) kemudian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *agreement* yang menguraikan disiplin dan batas-batas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan dari wabah penyakit, dan kontaminan dari negara asing. Kasus penolakan merupakan salah satu bentuk dalam proteksi. Proteksi secara umum dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri normalnya proteksi sering kali dijumpai dalam bentuk hambatan non tarif.

Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Sunorita menggunakan strategi penolakan produk ekspor suatu komoditi yang hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari proteksionisme dengan tujuan untuk melindungi produk-produk domestik dari persaingan dengan produk-produk asing yang masuk kedalam negeri (produk impor). Regulasi terkait mutu dan keamanan pangan khususnya di Eropa sendiri memiliki lima komponen kebijakan umum dalam impor makanan yaitu:

1. Standar pemasaran dan informasi konsumen
2. Organisasi dari eksportir/produsen
3. *Interbranch* organisasi dan persetujuan
4. Harga dan intervensi harga
5. Perdagangan dengan negara ketiga

Kebijakan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai hambatan perdagangan bagi produk impor terhadap setiap komoditi yang masuk ke Uni Eropa (Sunorita, 2013:3).

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan diatas kebijakan penolakan yang termasuk ke dalam salah satu bentuk proteksi berorientasi pada pengawasan keamanan produk (*product safety*), dimana keamanan produk dapat mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas produk yang dalam hal ini Melisa mengambil sektor perikanan. Penolakan yang dilakukan mendorong eksportir untuk berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dalam artian merupakan mutu produk dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan agar produk-produk dari para ekportir (produk asing/impor) dapat masuk ke pasar domestik suatu negara.

Sementara itu Darmiati Dahar *et al.* (2014) meneliti mengenai analisis pemberlakuan *non-tariff barriers* (NTBs) pada sektor eskpor hortikultural.

memfokuskan penelitiannya pada perdagangan Indonesia dengan ASEAN +3 dalam salah satu subsektor yang penting dalam menunjang ketahanan pangan. Ia juga menyimpulkan bahwa perdagangan Indonesia dengan ASEAN +3 dalam sektor hortikultural mengalami pertumbuhan yang cukup stabil sejak tahun 2007 hingga 2011. Tindakan non tarif seperti *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang dikenakan kepada ASEAN +3 pada subsektor hortikultural diberlakukan kepada seluruh jenis hortikultural dan yang paling banyak yakni pada sayuran. Darmiati *et al.* Juga memaparkan dengan melihat neraca perdagang Indonesia dengan ASEAN +3 bahwa Indonesia mengalami defisit baik pada kelompok sayuran maupun buah-buahan dalam perdagangan dengan Tiongkok sedangkan dengan negara lain yakni Jepang dan Korea Selatan memiliki neraca yang surplus. Ia juga melakukan analisis pada pemberlakuan tindakan non tarif kepada ASEAN +3 yaitu:

1. Menghitung jumlah pemberlakuan *Non-Tariff Barriers/NTBs* (*Incidence of NTBs*). Hal tersebut menyajikan sebaran penggunaan NTBs baik berdasarkan negara, komoditas, maupun jenis NTBs.
2. *Frequency Index*, menyajikan besaran indeks yang dapat dijadikan ukuran tingkat hambatan di suatu negara.
3. *Coverage Ratio*, memberikan informasi seberapa besar cakupan komoditi impor yang terkena NTBs (Darmiati *et al*, 2014:105).

Berbeda dengan dua peneliti diatas, Michael Daly dan Sergios Stamnas dalam penelitiannya *Tariff and Non-Tariff Barriers to Trade in Korea*, menjelaskan bagaimana peran pemerintah Korea (yang dalam kasus ini merujuk pada pemerintah Korea Selatan) dalam mentoleransi peran konglomerat Korea Selatan (*Chaebols*) serta perusahaan-perusahaan milik negara yang dapat menghambat atau

menghalangi liberalisasi perdagangan. Daly dan Stamnas dalam penelitiannya menceritakan bagaimana pemerintah dalam menerapkan tarif perdagangannya yang mereka indikasikan menjadi 12 indikator:

1. Persentase semua tarif (termasuk kuota “*in quota*” dan “*out-of-quota*” yang “terkait”;
2. Persentase tarif yang diterapkan bagi *Most Favoured Nation* (MFN) adalah nol;
3. *Non-ad valorem* (khusus) dan tarif alternatif sebagai persentase dari semua tarif;
4. Tarif kuota sebagai presentase dari semua tarif;
5. Tarif yang bukan equavalen *ad valorem* (AVEs) sebagai presentase *tariff lines*;
6. Tarif rata-rata dari “keterkaitan” tarif MFN;
7. “Menerapkan” tarif rata-rata tarif MFN *ad valorem*;
8. Tarif impor rata-rata MFN (menggunakan bobot impor OECD 1998);
9. Jumlah “lonjakan” tarif domestik sebagai persentasi *tariff lines*, yang artinya “lonjakan domestik” sebagai tarif MFN yang telah diterapkan
10. melebihi tiga kali rata-rata sederhana (indikator 7) untuk semua produk;
11. Jumlah “lonjakan” tarif internasional sebagai persentasi dari *tariff lines* yang didefinisikan sebagai tarif MFN yang berlaku melebihi 15%;
12. Standar deviasi (SD) dari tarif MFN yang berlaku; dan
13. Variasi Koefisien (VK) dari tarif MFN yang diterapkan (Daly dan Stamnas, 2001:7).

Tinjauan penelitian yang terakhir oleh Uzair J. Kayani dan Sikander A. Shah yang meneliti tentang *Non-Tariff Barriers and Pakistan's Regional Trade: A Legal*

and Economic Analysis of Non-Tariff Barriers in Pakistan, India, China and Sri Lanka. Kayani dan Sikander memiliki fokus objek Pakistan, India, Tiongkok dan Srilanka, di Pakistan kebijakan NTBs berlaku pada produk-produk tertentu seperti Agrikultur, ada dominasi dalam penerapan kebijakan NTBs di Pakistan yang hasilnya telah jelas dapat diprediksi hal ini disebabkan oleh campur tangan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang merupakan badan di Pemerintahan Federal Pakistan yang bertanggungjawab atas aturan perdagangan. Hal tersebut pula yang mengontrol pengembangan perdagangan dan beberapa lembaga lainnya (Kayani dan Shah, 2014:2).

Kebijakan NTBs yang diterapkan oleh India pula terfokus pada satu produk yakni produk elektronik. Pemerintah India juga terkadang menerapkan kebijakan ini kepada suatu negara. Kayani dan Shah memaparkan bahwa ada dua hal yang membuat kebijakan NTBs di India dapat dikategorikan khusus. *Pertama*, pemerintah India menerapkan yang disebut sebagai *soft barriers*, pemerintah India lebih beroperasi pada penundaan birokrasi bukan penghambatan. *Kedua*, India lebih sering berfokus pada industri dan mitra dagang tertentu (Kayani dan Shah, 2014:3).

Tiongkok secara reguler telah setidaknya menggunakan 18 instrumen dalam penerapan NTBs, Tiongkok lebih menfokuskan pada industrinya. Sebagian besar NTBs Tiongkok lebih kepada penundaan yang dapat meningkatkan biaya pesaing asing dibandingkan harus menutupnya. Dalam hal ini kongres Tiongkok memiliki peran dalam penafsiran hukum, pemberlakuan keputusan, menandatangani perjanjian serta menyetujui rencana ekonomi (Kayani dan Shah, 2014:4).

Berbeda dengan Pakistan, India dan Tiongkok, Sri Lanka menerapkan sebagian besar NTBs terhadap produk zat berbahaya seperti opium, racun dan unsur radioaktif. NTBs yang diterapkan Sri Lanka secara tersirat tidak melindungi

kelompok-kelompok tertentu dalam perdagangannya, dapat diartikan bahwa konsumen Sri Lanka lebih baik dibandingkan dengan konsumen di tiga negara sebelumnya (Kayani dan Shah, 2014:4).

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Objek Penelitian	Fokus Penelitian	Konep	Metode	Hasil Penelitian
Melisa Sunorita (2013) "Kebijakan Hambatan Non Tarif di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udara Indonesia"	Indonesia dengan Uni Eropa	<i>Technical Barrier to Trade</i> (TBT) yang meliputi tiga area kebijakan: 1. <i>Mandatory Technical Regulation</i> ; 2. <i>Voluntary Standards</i> ; dan 3. <i>Conformance Assessment</i> .	Neo-Merkantilisme dan Proteksionisme	Kualitatif	Kebijakan ini menghambat perdagangan khususnya ekspor udara Indonesia ke Eropa akibat adanya standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Merespon hal tersebut untuk meningkatkan kembali laju ekspor Indonesia, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan serupa dengan dalih untuk mengimbangi kebijakan serupa dengan Uni Eropa.
Darmiati Dahar et al. (2014) "Analisis Pemberlakuan Non-Tariff Barriers (NTBs) pada Ekspor Hortikultura Indonesia ke ASEAN+3"	Indonesia dengan ASEAN+3	Pemberlakuan <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS) dan <i>Technical Barriers to Trade</i> (TBT) yang dikenakan kepada ASEAN +3 pada subsektor hortikultural diberlakukan kepada seluruh jenis hortikultural.	Liberalisme, Konsep <i>Sanitary and Phytosanitary</i> dan Konsep <i>Technical Barriers to Trade</i>	Kualitatif	1. Peningkatan perdagangan dan kinerja perekonomian Indonesia pada sektor hortikultura meningkat setiap tahunnya dan Singapura menjadi negara tujuan ekspor hortikultura terbesar bagi Indonesia; dan 2. <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS) serta <i>Technical Barriers to Trade</i> (TBT) banyak diberlakukan pada sektor hortikultura khususnya sayuran khususnya Jepang paling banyak memberlakukan kebijakan ini sedangkan Singapura tidak sama sekali memberlakukan SPS maupun TBT.
Michael Daly dan Sergios Stamnas (2001) "Tariff and Non-Tariff Barriers to Trade in Korea"	Korea Selatan	Tarif dan peran Konglomerat Korea Selatan (<i>Chaebols</i>).	Konsep Tarif dan Kebijakan	Kualitatif	Tarif bea impor (bea masuk) telah menjadi kebijakan perdagangan utama di Korea Selatan dan dapat dianggap sebuah distorsi dan ancaman perdagangan bagi negara lain namun, pemerintah tidak ambil pusing mengenai hal tersebut pasalnya kebijakan mengenai tarif bea impor yang mereka terapkan tidak melanggar aturan-aturan WTO dan aturan perdagangan yang merugikan bagi negara lain dengan menjunjung tinggi teknik tarif yang beracuan pada <i>Most-favoured-nation</i> (MFN).
Uzair J. Kayani dan Sikander A. Shah (2014) "Non-Tariff Barriers and Pakistan's Regional Trade: A Legal and Economic Analysis of Non-Tariff Barriers in Pakistan, India, China and Sri Lanka"	Pakistan, India, Tiongkok dan Srilanka	Peran Pemerintah empat negara yang menjadi objek teliti dan penerapan terhadap produk dan sektor tertentu: Pakistan: Produk Agrikultur; India: Produk Elektronik; Tiongkok: Sektor Industri; dan Sri Lanka: Produk Zat berbahaya (opium, racun dan zat radioaktif)	Konsep Ekspor-Impor dan Konsep <i>Non Tariff Barriers</i>	Kualitatif	Pakistan menerapkan kebijakan NTBs yang lebih rendah dibandingkan dengan India, Tiongkok dan Sri Lanka. Dampak dari adanya hal tersebut kebijakan ini tidak berdampak signifikan bagi impor Pakistan tapi justru menyebabkan surplus perdagangan bagi India dan Tiongkok yang melakukan perdagangan dengan Pakistan. Sedangkan, untuk India, Tiongkok dan Sri Lanka dalam penerapan kebijakan NTBs khususnya sektor impor mereka sangat ketat untuk menghambat masuknya produk-produk asing yang disebabkan oleh adanya rezim perdagangan bebas.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Neoliberalisme

Perspektif neoliberalisme merupakan perspektif yang muncul dari empat perdebatan besar (*Great Debate*) dalam studi hubungan internasional yang biasanya disebut sebagai *Grand Theory*. Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith dalam bukunya yang berjudul “*International Relations Theories*”, menjabarkan perspektif ini sebagai salah satu varian yang berfokus pada peran suatu lembaga pada kerja sama internasional dengan negara sebagai aktor utamanya (*state-centric*), hal ini yang membuat varian ini sering disebut **neoliberal institusionalisme**. Sama halnya dengan realis strukturalisme, neoliberalisme masih menganggap bahwa negara merupakan satu kesatuan aktor yang rasional yang mampu memaksimalkan otoritasnya dalam mendominasi dunia internasional, akan tetapi perspektif ini sangat jelas berbeda dari perspektif realisme, karena perspektif ini muncul dari asumsi dasar liberalisme yang berfokus pada diri manusia (Dunne, Kurki dan Smith, 2013:115).

Pada dasarnya peran institusi pada perspektif ini hanya sebatas pada negosiasi dan *bargaining*, negosiasi lebih mengarah pada sebuah diskusi untuk menentukan arah dari suatu kebijakan melalui kerja sama oleh dua negara atau lebih sedangkan *bargaining* mengacu pada suatu proses diplomatik yang sangat strategis yang melibatkan kepentingan politik untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah perdagangan antar dua negara atau lebih. Menurut Keohane, institusi dan rezim merupakan instrumen penting, karena kedua hal tersebut dapat memungkinkan negara untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh negara. Neoliberal lebih memandang rezim sebagai hal yang positif dibandingkan realis yang memandang rezim sebagai kendala bagi perilaku negara; hal ini karena

neoliberal memandang bahwa sebenarnya institusi dan rezim dapat membantu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya (*national interest*), namun Keohane berpendapat bahwa institusi dan rezim justru justru dapat membuat negara bergantung pada kedua hal tersebut dalam mencapai kepentingannya (Viotti dan Kauppi, 2012:149).

Adanya Kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meliberalisasikan perdagangan hal ini pula yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang dalam kerja sama perdagangannya. Pada hakikatnya, liberalisasi perdagangan secara eksplisit negara membuka pasar seluas-luasnya bagi produk berupa barang dan jasa dari negara lain tanpa adanya hal-hal yang dapat menghambatnya. Namun, Dalam buku *The Politics of International Economic Relations* oleh Joan E. Spero dan Jeffrey A. Hart terdapat pola masalah yang tumbuh dari NTBs dengan meliberalisasikan produk yang ia beri contoh pada produk manufaktur melalui penghapusan kuota dan tarif, hambatan utama dalam NTBs muncul dari kebijakan pengadaan pemerintah, prosedur kepabeanan, *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), standar nasional serta kebijakan regional, kebijakan pertanian dan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan (Spero dan Hart, 2010:93).

Dalam teori neoliberal, mobilitas modal antar sektor, wilayah maupun negara dianggap penting. Semua hambatan yang dapat menghambat mobilitas tersebut, seperti tarif, aturan pajak, perencanaan, kontrol lingkungan dan hambatan yang sifatnya lokasional harus di hapus, kecuali pada area-area yang dianggap krusial dalam “**kepentingan nasional**” negara (Harvey, 2005:66).

1.2.2. Kebijakan Luar Negeri

Pada hakikatnya, Kebijakan luar negeri merupakan strategi pemerintah sebagai acuan bertindak suatu negara dalam dunia internasional. Kebijakan luar negeri, merupakan seperangkat instrumen yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional negara tersebut yang telah di putuskan oleh pimpinan negara dalam suatu hubungan negara atau situasi tertentu. Dalam bukunya yang berjudul “*International Relations*”, Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse berpendapat bahwa studi mengenai kebijakan luar negeri biasanya berfokus pada tiga hal: ukuran (*Size*), kekayaan (*Wealth*) dan tingkat partisipasi demokratis dalam pemerintahan (*the Extent of Democratic Participation in Government*) (Goldstein dan Pevehouse, 2014:146). Untuk melihat ukuran (besar atau kecil) dan kekayaan (kaya atau miskin) suatu negara menurut Goldstein dapat dilihat dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. “*The best single indicator of a state’s power may be its total GDP, which combines overall size, technological level, and wealth* (Goldstein, 2013:45-46).”

Selain itu, untuk mengukur tingkat partisipasi demokratis dalam pemerintahan, yaitu dapat dilihat melalui partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan politik. Sedangkan menurut literatur lain, untuk melihat ukuran (besar atau kecil) dan kekayaan (kaya atau miskin) suatu negara dapat dilihat melalui indikator yang disebut sebagai “instrumen ekonomi” dalam kebijakan luar negeri yang dapat dilihat melalui: jumlah bantuan luar negeri, jumlah perdagangan, kebijakan perdagangan serta sanksi ekonomi, seperti embargo, boikot, pembekuan dana dan aset serta pembatasan perdagangan (Mintz dan DeRouen Jr, 2010:136).

Biasanya dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, didasari pada model rasional (*rational model*). Model rasional dapat dikatakan sebagai cara

para pembuat keputusan untuk menetapkan tujuan, mengevaluasi kepentingan, menghitung biaya (*cost*) dan manfaat dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan oleh suatu negara. Metode yang sering digunakan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yakni dengan *government bargaining model* yang artinya kebijakan luar negeri dihasilkan melalui proses perundingan di antara berbagai instansi pemerintah dengan kepentingan yang berbeda-beda, *government bargaining model* biasanya dilihat dari hasil rancangan kertas kebijakan atau yang sering disebut sebagai bunga rampai, dari rancangan ini dapat dilihat nantinya kebijakan pada sektor mana yang terlihat lebih menonjol, apakah sektor ekonomi, sosia dan budaya atau justru keamanan.

Tujuan utama dari kebijakan luar negeri sendiri yakni untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang secara garis besar dapat dilihat melalui dua area, yakni: area ekonomi dan area politik. Dalam area ekonomi, kebijakan luar negeri bertujuan untuk mempromosikan perdagangan, membentuk kebijakan investasi serta membantu memperlancar strategi dan negosiasi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Dalam area politik kebijakan luar negeri bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hal atas eksplorasi sumber daya negaranya, membentuk kerja sama internasional yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dan proyeksi internasional yang terdiri dari pengaruh tidak langsung dari aspek-aspek yang telah disebutkan diatas (Spohr dan Silva, 2017:160).

1.2.3. *Non-Tariff Barriers* (NTBs)

Dalam bukunya yang berjudul “*Measurement of Non-tariff Barriers: Studies in International Economics*”, Alan V. Deardorff dan Robert M. Stern memaparkan mengenai NTBs yang pada dasarnya terdiri dari instrumen hambatan

non tarif. Istilah NTBs secara umum memang lebih sering digunakan ke dalam intervensi perdagangan, seperti subsidi ekspor yang berfungsi sebagai pendorong atau perangsang perdagangan daripada menghambat perdagangan, karena NTBs sebenarnya bukan “hambatan” dalam perdagangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa NTBs merupakan kebijakan distorsi perdagangan seperti kuota impor dan pengekan ekspor sukarela (*voluntary export restraints* atau VERs) yang juga dikenal sebagai *Voluntary Restraints Agreement* (VRA). Secara jelas Deardorff dan Stern mengatakan bahwa ada faktor institusi dalam NTBs, yang menyatakan bahwa negara-negara mungkin berbeda dalam lembaga sosial dan budaya, namun yang negara yakin kebijakan merupakan refleksi dari **kepentingan nasional** (Deardorff dan Stern, 1999:3).

Pengaruh NTBs terhadap perdagangan internasional sendiri, yakni terletak pada peningkatan volume perdagangan. Kebijakan NTBs yang diterapkan oleh negara-negara yang menyetujuinya melalui perjanjian kerja sama bilateral, membuat negara dapat memperlancar pergerakan barang dan serta membuat produk dan industri domestik mampu bersaing dengan produk asing. Pengaruh tersebut dapat tercapai apabila, negara-negara yang melakukan perjanjian kerja sama bilateral dalam bidang *Non-Tariff Barriers* sama-sama sepakat sejak awal dibentuknya perjanjian tersebut dan adanya intervensi pemerintah terhadap efisiensi dan produktivitas perekonomian yang sesuai dengan fungsinya, yakni stabilitasi, alokasi dan distribusi untuk menghindari dari adanya kegagalan pasar (*market failure*) (Subhechanis, 2017:89).

NTBs sendiri memiliki beberapa kegunaan. *Pertama*, untuk mengontrol harga produk di pasar internasional. Kegunaan ini berfungsi agar **produsen domestik menggunakan harga jual sesuai harga di pasar internasional**, hal

tersebut juga berguna agar negara tidak melakukan politik dumping dalam melakukan perdagangan. *Kedua*, membantu memperlancar perdagangan antar negara. Hal tersebut disebabkan kebijakan ini memberlakukan hambatan yang bersifat bukan tarif melainkan non tarif seperti kuota dan lainnya. *Ketiga*, mengontrol kuantiti produk yang masuk. Hal ini berguna agar negara penerima tidak terkena *serious injury* akibat adanya lonjakan impor, hal ini sangat berbeda dengan proteksionisme yang menghambat produk yang masuk karena NTBs bukanlah untuk menghambat perdagangan, dalam kasus ini NTBs mengontrol kuantiti barang yang masuk dengan memberlakukan kuota impor (UNCTAD, 1).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jalannya atau pengamplikasian kebijakan *Non-tariff barriers* (NTBs) seperti menurut Chin memberikan tiga faktor penentu, yaitu *terms of trade*, dinamika pasar global dan *political institution* (Chin, 2015:168); menurut Vinokurov GDP riil negara pengimpor, *domestic political risk*, dan dinamika pasar global (Vinokurov *et al.*, 2016:13); menurut Dominick perubahan *terms of trade*, dinamika pasar global dan GDP riil negara pengimpor (Dominick, 2013: 486); Fugaza, *Price Comparisson, Policy Maker* dan dinamika pasar global (Fugazza, 2013:10). Beberapa faktor diatas membuat penulis akhirnya menentukan faktor-faktor yang akan digunakan untuk melihat pengaruh penurunan nilai dan volume melalui faktor-faktor yang telah ditentukan.

Penulis menyimpulkan dari beberapa faktor tersebut yang telah dipaparkan oleh beberapa *scholars*, ada tiga faktor penentu yang mempengaruhi ekspor khususnya ekspor non migas Indonesia ke Jepang, hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa secara simultan ada hubungan antara **perubahan *terms of trade***, **dinamika pasar global** dan **GDP riil negara pengimpor** dengan pertumbuhan

ekonomi Indonesia terhadap ekspor non migas Indonesia ke Jepang. Faktor-faktor yang memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor non migasnya ke Jepang (Dominick, 2013:486), yaitu:

1. Perubahan *Terms of Trade* (ToT)

Adanya perubahan pada nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap harga barang-barang ekspor suatu negara, hal tersebut yang nantinya mempengaruhi *purchasing power* negara pengimpor, apakah nantinya negara pengimpor tersebut mampu untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan atau tidak.

2. GDP Riil Negara Pengimpor (Jepang)

Pertumbuhan perekonomian domestik negara pengimpor menjadi faktor yang juga mendukung adanya peningkatan permintaan ekspor sebuah produk. Artinya, apabila tingkat pertumbuhan negara pengimpor tinggi maka, tingkat konsumsi akan naik dan permintaan akan ekspor suatu produk akan meningkat yang mengakibatkan nilai ekspor negara pengekspor akan meningkat.

3. Dinamika Pasar Global

Fluktuasi harga pasar global sangat berpengaruh terhadap harga ekspor produk suatu negara, pasalnya harga ekspor suatu negara ditetapkan berdasarkan harga jualnya berdasarkan harga pasar global dengan adanya hal tersebut secara jelas bahwa hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi volume ekspor sebuah komoditas.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran, penulis berusaha untuk menjelaskan secara sistematis mengenai bagaimana pengaruh kebijakan NTBs terhadap peningkatan volume dan nilai ekspor perdagangan Indonesia ke Jepang 2008-2015. Penjelasan mengenai hal tersebut digambarkan melalui kerja sama bilateral perdagangan antara Indonesia dengan Jepang yang ditandai dengan adanya *Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership* atau yang lebih dikenal dengan IJEPA.

IJEPA yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang menghasilkan kebijakan *Non-Tariff Barriers* Indonesia terhadap perdagangannya dengan Jepang. Kebijakan ini secara teoritis bertujuan untuk membantu memperlancar transfer barang atau jasa dari satu negara ke negara lain namun, ada yang berbeda pada kasus perdagangan Indonesia ke Jepang. Hal unik yang muncul justru perdagangan antara Indonesia dengan Jepang mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2008-2015, hal tersebut sangat disayangkan karena kebijakan NTBs yang harusnya meningkatkan volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang justru tidak sesuai dengan data aktual yang ada.

Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan ekspor Indonesia dengan mengingat bahwa ekspor sangat bergantung pada kondisi perekonomian suatu negara. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan peningkatan ekspor Indonesia, yaitu:

1. Perubahan *Terms of Trade* (ToT)

Dalam hal ini perubahan nilai tukar yang mengalami fluktuasi dapat mempengaruhi secara langsung terhadap harga barang-barang ekspor Indonesia terlebih jika harga barang tersebut secara jelas dinyatakan dengan

mata uang dalam negeri (rupiah) dengan kata lain secara singkat bahwa kurs valuta asing berbanding lurus dengan penawaran akan ekspor, apabila mata uang negara pengeksport terdepresiasi maka akan mengakibatkan harga produk di negara pengeksport menjadi lebih murah sehingga mendorong permintaan produk dari negara lain atau disebut sebagai *purchasing power*.

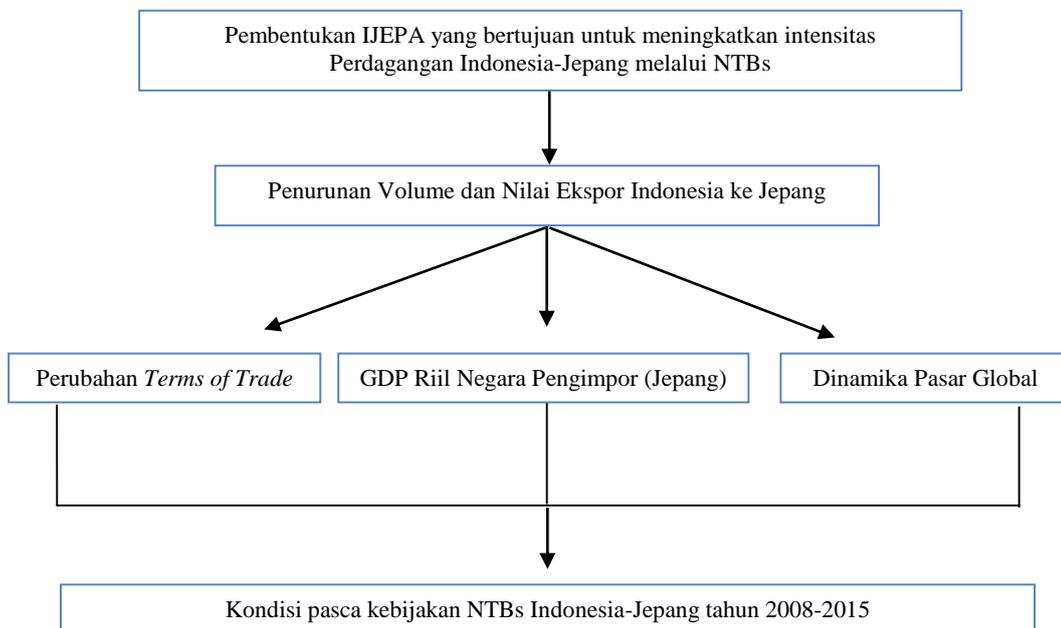
2. GDP Riil Negara Pengimpor (Jepang)

GDP riil negara pengimpor memiliki arus yang positif terhadap ekspor suatu negara, kenaikan yang terjadi pada pendapatan suatu negara akan berdampak positif terhadap kenaikan akan permintaan komoditas ekspor.

3. Dinamika pasar global

Adanya dinamika pasar global yaitu fluktuasinya harga pada pasar global merupakan faktor yang mempengaruhi volume ekspor sebuah komoditas.

Berikut gambaran kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembangunan logika dan asumsi filosofis. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif meneliti hubungan pengaruh kausalitas (sebab-akibat) yang digunakan dalam menjelaskan hubungan kebijakan *Non-Tariff Barriers* terhadap penurunan volume perdagangan Indonesia ke Jepang. Dengan menggunakan alur logika induktif, penulis harus membangun logika berfikir “*bottom-up*”, yang artinya penulis mengembangkan atau mengkonfirmasi konsep yang dimulai dengan bukti empiris konkrit (data konkrit) yang kemudian dilakukan analisis data yang menghasilkan abstraksi dan hubungan teoritis yang akan membantu penulis untuk menarik kesimpulan dan memunculkan fakta baru (Neuman, 2013:51-70).

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau intisari penelitian merupakan langkah awal dari penulis dalam membantu penulis untuk melakukan observasi dan analisis yang nantinya akan memberikan kontribusi pada hasil observasi dan analisis masalah yang diteliti. Fokus penelitian menjadi acuan utama penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian sehingga hasil atas penelitian menjadi akurat dan terarah.

Adanya hal tersebut, maka penulis menfokuskan penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peningkatan volume dan nilai perdagangan Indonesia ke Jepang tahun 2008-2015, yaitu:

1. Kondisi *Terms of Trade* (ToT) Indonesia dan Jepang. Penulis akan melihat serta memaparkan dampak penurunan volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2008-2015 melalui faktor kondisi dinamika nilai tukar (*the dynamics of exchange rates*);
2. Kondisi GDP riil negara pengimpor (Jepang). Penulis akan melihat dan memaparkan bagaimana kondisi perekonomian domestik negara pengimpor yaitu Jepang, apakah Jepang memiliki kondisi perekonomian dan GDP riil yang baik atau justru buruk pada kurun waktu 2008-2015 sehingga mempengaruhi *purchasing-power*nya dalam perdagangan dengan Indonesia.
3. Kondisi dinamika pasar global. Penulis akan memaparkan mengenai bagaimana kondisi dinamika pasar global yang dilihat melalui harga serta permintaan global yang dapat mempengaruhi penurunan volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2008-2015; dan

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data dimana peneliti pada penelitian terdahulu terlibat langsung dalam pengerjaan dan pengumpulan data. Data yang berbentuk teks informasi (dokumen-dokumen pemerintah) serta data kualitatif yang umumnya merupakan kumpulan sumber data yang sangat heterogen yang meliputi, dokumen pribadi, dokumen resmi baik yang bersumber dari negara maupun swasta, dan

media masa (Bryman, 2012:543). Data skunder adalah data yang bersumber pada publikasi sebuah penelitian serta pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai masalah dan tujuan yang sama.

Data yang berbentuk teks informasi dan numerik didapatkan dari observasi tidak langsung juga menempatkan posisi pada pengamat yang ikut berperan serta di dalam observasi (*Participant Observation*), data tersebut bersumber pada buku atau literatur, dokumen baik dokumen yang berbentuk cetak maupun dokumen yang berbentuk digital atau *online*, termasuk publikasi data numerik, seperti Neraca Perdagangan yang dipublikasi oleh Kementerian Perdagangan RI, *World Bank*, Badan Pusat Statistik, perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia dan Jepang di dalam perdagangan internasional yang dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang, seperti *Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership*.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis *Negative Case* serta proses analisis data Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Negative Case*, merupakan analisis data kualitatif yang berfokus pada suatu kasus yang tidak sesuai dengan teori atau konsep yang ada serta menggunakan rincian dari kasus tersebut untuk membenahi teori atau konsep yang keliru (Neuman, 2013:499). Pada dasarnya metode analisis data kualitatif ini merupakan cara sistematis untuk meneliti (*examine*) suatu yang tidak ada atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Negative Case menganalisis dengan melihat bukti yang ada dalam data yang telah terkumpul. Hal tersebut sesuai dengan alur logika induktif (*bottom-up*),

namun metode analisis ini juga melihat hal-hal yang tidak eksplisit dalam data atau apa yang tidak terjadi, hal ini berguna untuk memahami proses dalam menghasilkan ide-ide baru.

Miles dan Huberman memaparkan di dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*” mereka mendefinisikan analisis sebagai sebuah aktifitas yang terdiri dari tiga bagian yang mereka sebut sebagai “*Flow Model*” (Miles dan Huberman, 1994:10). Proses analisa data oleh Miles dan Huberman dipilih penulis dengan alasan proses ini mengandung proses yang sistematis dan jelas yang nantinya akan membantu penelitian ini menjadi terarah.

Tiga bagian proses analisis data oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mengarah pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengolah data. Menurut Miles dan Huberman, Reduksi data bukanlah suatu teknik yang terpisah dari analisis, tetapi reduksi data merupakan bagian dari analisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahapan dimana data dikumpulkan melalui informasi-informasi yang telah didapatkan kemudian disajikan secara terorganisir yang dapat membantu dan mempermudah penulis untuk menarik kesimpulan. Maksud dari disajikannya data secara terorganisir sendiri, yakni merupakan penyajian data dalam segala bentuk termasuk matriks, grafik, tabel, dan jaringan-jaringan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahapan yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan ini merupakan kegiatan terakhir, sejak awal mulai dari pengumpulan data, analisis kualitatif untuk menentukan apakah yang sebenarnya yang terjadi, penentuan pola-pola, eksplanasi, hal-hal yang mungkin terjadi, alur kausalitas, dan proposisi. Dalam tahapan ini penulis memaparkan hasil penelitian yang telah Ia lakukan, temuan-temuan ini nantinya akan membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan data penelitian mengenai keadaan serta dinamika yang terjadi di kedua negara, Indonesia dan Jepang. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana peran kedua negara dalam kerja sama yang telah terjalin serta bagaimana dampak dari adanya kerja sama tersebut. Pemaparan pada bab ini akan dibagi kedalam tiga bagian untuk menguraikan secara mendetil dari permasalahan kerja sama perdagangan bilateral yang dihadapi oleh kedua negara. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai sejarah singkat kerja sama NTBs yang telah terjalin antara Indonesia dengan Jepang. Pada bagian kedua akan dibahas mengenai dinamika politik serta ekonomi di kedua negara pada rentang tahun 2008-2015 dan pada bagian ketiga akan membahas dan menguraikan terkait kerja sama NTBs antara Indonesia dengan Jepang 2008-2015.

4.1. Kerja sama *Non Tariff Barriers* Indonesia-Jepang

4.1.1. Sejarah Kerja sama NTBs Indonesia-Jepang

Tarif sering dikenal sebagai *customs*, *duties*, atau *charges*. Tarif dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) merupakan pajak yang dikenakan pada suatu komoditas yang memperdagangkan produk-produk yang melintasi batas teritorial suatu negara (*cross-border*). Namun, pada umumnya tarif dikenakan pada

barang impor, meskipun juga sering dikenakan pada barang ekspor. Tarif biasanya dikaitkan oleh kebijakan ekonomi mengenai perdagangan antarbangsa (Kementerian Perdagangan RI, 1).

Salah satu kebijakan ekonomi mengenai pembatasan perdagangan antarbangsa adalah kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs), NTBs sendiri sudah berkembang sejak tahun 1980an yang dimulai sejak Jepang memberlakukan hambatan ekspor mobil ke Amerika Serikat (Coughlin dan Wood, 1989:32). *Non-Tariff Barriers* (NTBs) biasanya digunakan sebagai instrumen kebijakan komersial dan juga digunakan sebagai kebijakan strategi suatu negara dalam mengatur stabilitas perdagangan bebasnya dengan negara lain, instrumen tersebut terdiri dari 16 klasifikasi sesuai dengan *Tokyo Round* dan *United Nations on Trade and Development* (UNCTAD), klasifikasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada halaman 36.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Jepang telah dimulai sejak Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1951. Pada saat itu, Jepang membuat negara-negara bekas jajahannya menandatangani perjanjian ekonomi sebelum Jepang akhirnya memberikan kompensasi reparasi perang kepada negara-negara jajahannya di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang mendapat US\$ 223 juta pada tahun 1958. Namun, ada indikasi lain atas hal ini, bantuan yang Jepang berikan tidak semata-mata hanya untuk kompensasi kepada negara jajahan saja tetapi, Jepang memiliki kepentingan dalam memperbaiki citranya juga dalam perluasan kerja sama ekonomi bilateral khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut diusahakan Jepang guna membangun perekonomian dan meningkatkan standar hidup masyarakat Jepang pada saat itu (Ikbal, 2016:15-17).

Pada tahun 1977, merupakan tahun terpenting bagi perkembangan hubungan Jepang dengan kawasan Asia Tenggara. Karena, pada tahun ini muncul yang disebut sebagai Doktrin Fukuda, pada hakikatnya doktrin Fukuda merupakan pidato Perdana Menteri Jepang pada masa itu, Takeo Fukuda. Doktrin Fukudalah yang menegaskan kepentingan Jepang di kawasan Asia Tenggara, namun, dalam pidatonya ia berasumsi bahwa Jepang memiliki tanggungjawab sebagai *big power* di Asia Tenggara. Hal yang ditekankan oleh doktrin ini yaitu hubungan “*heart-to-heart*” dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan, kerja sama bilateral khususnya dalam bidang ekonomi serta memastikan kesamaan dan persamaan kekuatan antara Jepang dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Harriden, 2012:160).

Pada 12 Agustus 2007 di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Indonesia dengan Jepang tentang Kebijakan *Non-Tariff Barriers* (NTBs), yang ditandai dengan terbentuknya *Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership* yang berisi 15 bab, 151 pasal. Pasal mengenai *Non-Tariff Barriers* yang diatur pada pasal 23, perjanjian ini disepakati oleh kedua negara dan disetujui serta ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzō Abe, hal tersebut menandakan semakin eratnya hubungan kedua negara dalam menjalin kerja sama bilateral.

Pada kerja sama bilateral tersebut penulis telah menggaris bawahi enam poin yang dijalin kedua negara melalui pidato yang disampaikan oleh Presiden SBY saat kunjungannya ke Jepang yang secara simbolis untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat Jepang. Presiden SBY yang datang untuk kunjungan diplomatik pada 11 Juni 2011 dan disambut oleh Perdana Menteri Jepang yang pada saat itu menjabat, Naoto Kan. Setelah pertemuannya dengan PM Naoto Kan,

presiden SBY kemudia mengisi kuliah umum di *The National Graduate Institute for Policy Studies* (GRIPS), Roppongi, Minato-ku, Tokyo (Tempo.co, 2011:1).

Dalam kuliah umumnya presiden SBY menyampaikan arah kerja sama Indonesia Jepang yang presiden SBY penulis simpulkan menjadi empat poin fundamental kerja sama Indonesia dengan Jepang, yaitu:

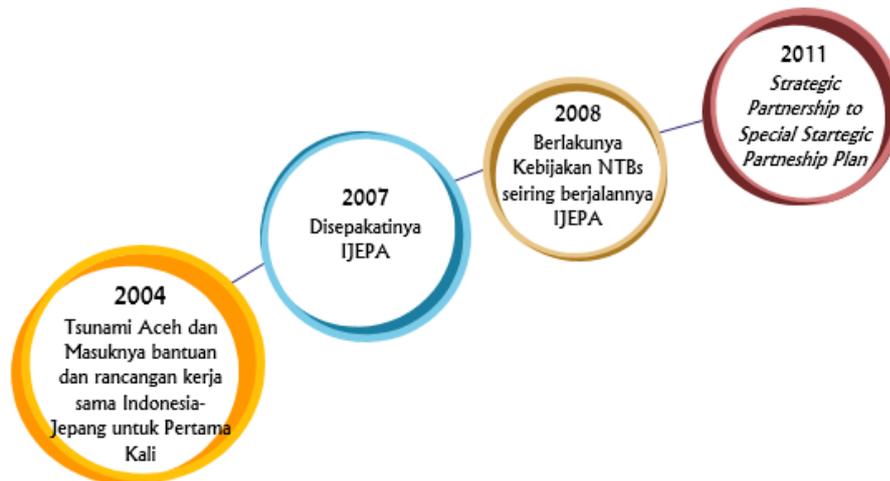
1. Perlunya perluasan kerja sama dalam bidang perekonomian, perluasan pada hal ini merujuk pada *Special Strategic Partnership*, yaitu peningkatan level serta intensitas kerja sama perekonomian dari *Strategic Partnership* menjadi *Special Strategic Partnership*. Tentunya hal tersebut menjadi langkah Indonesia untuk mencapai akses pasar Jepang yang lebih luas serta membuat adanya spesifikasi sektor kerja sama dan perluasan investasi Jepang di Indonesia namun, hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini dapat dikatakan kerja sama Indonesia dengan Jepang tertinggal satu langkah dari kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan yang telah mencapai pada level *Special Strategic Partnership* pada November 2017.
2. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Kerja sama Indonesia-Jepang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi kawasan regional ASEAN. Dari hal tersebut secara eksplisit pemerintah Indonesia ingin Jepang untuk ikut berperan aktif dalam pembentukan kerja sama serta membentuk ikatan *amity* yang kuat secara regional baik itu bagi ASEAN, ASEAN+1, ARF, ASEAN+3 ataupun dalam KTT Asia Timur.
3. Kerja sama Indonesia dengan Jepang akan berorientasi pada *green economy*, Indonesia sangat ingin mengurangi penggunaan emisi gas rumah kaca bahkan Indonesia telah merancang pengurangan gas rumah kaca sebesar

26% dan dengan bantuan Jepang yang sudah berpengalaman dalam mengelola sumber daya mineral tanpa mengurangi daya saing produk.

4. Indonesia berharap dengan adanya kerja sama dengan Jepang, kedua negara dapat meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Melihat hal tersebut Indonesia berharap bahwa dengan kerja sama ini dapat memunculkan adanya *sharing* teknologi dan ilmu pengetahuan dalam mengatasi masalah bencana alam serta kemanusiaan.

Empat fundamental kerja sama kedua negara tersebut membuat jelas bahwa pada dasarnya kerja sama NTBs adalah cerminan dari empat fundamental kerja sama antara Indonesia dengan Jepang yang memiliki kepentingan dari masing-masing pihak. Berikut penulis membuat *timeline* momentum terbentuknya kerja sama IJEPA antara Indonesia dengan Jepang.

Gambar 4.1.1. *Timeline* Momentum Kerja sama Indonesia-Jepang



Created by Galih Romadhona

Timeline diatas menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dengan Jepang telah dibangun oleh kedua negara yang dilandasi kepentingan perekonomian domestik terlebih setelah kedua negara mengalami bencana alam, membuat intensitas kerja sama yang berbasis sosial dan kemanusiaan meningkat dan mencapai total 11 perjanjian kerja sama.

Dalam perjanjian tersebut dijelaskan juga bahwa ada 16 jenis instrumen kebijakan NTBs yang diklasifikasikan kedalam dua klasifikasi, yakni *Technical Barriers* dan *Non-Technical Barriers* (UNCTAD, 2013:4). Kebijakan NTBs yang diterapkan Indonesia bersama Jepang mengacu kepada *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Common Effective Preferential Tariff Scheme* (CEPT Skema) serta terdiri dari enam kebijakan NTBs yang diterapkan.

Tabel 4.1.1.1. Klasifikasi NTBs Menurut UNCTAD dan Kebijakan NTBs Indonesia-Jepang

Technical Barriers	<i>Sanitary And Phytosanitary Barriers</i>
	<i>Technical Barriers To Trade</i>
	<i>Pre-Shipment Inspection And Other Formalities</i>
Non-Technical Barriers	<i>Contingent Trade-Protective Barriers</i>
	<i>Non-Automatic Licensing, Quotas, Prohibitions And Quantity-Control Barriers Other Than For SPS Or TBT Reasons</i>
	<i>Price-Control Barriers, Including Additional Taxes And Charges</i>
	<i>Finance Barriers</i>
	<i>Barriers Affecting Competition</i>
	<i>Trade-Related Investment Barriers</i>
	<i>Distribution Restrictions</i>
	<i>Restrictions On Post-Sales Services</i>
	<i>Subsidies (Excluding Export Subsidies Under P7)</i>
	<i>Government Procurement Restrictions</i>
	<i>Intellectual Property</i>
	<i>Rules Of Origin (RoO)</i>
	<i>Export-Related Barriers</i>

Sumber: UNCTAD, IJEPA dan CEPT Scheme, data telah diolah.

Dari enam kebijakan NTBs yang telah disepakati dan diterapkan oleh Indonesia dengan Jepang dalam kerja sama bilateral perdagangannya, kebijakan tersebut berlaku bagi delapan produk, hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) pada Annex 11, 4 dan 5 serta *Common Effectivite Preferential Tariff Scheme* (CEPT Skema).

Tabel 4.1.1.2. Produk yang disepakati dalam NTBs Indonesia-Jepang

No	Jenis Produk	Volume (Ton)	Nilai (US\$)
1	Alas Kaki (<i>Footwear</i>)	83.927	1.214.392.000
2	Batu Bara (<i>Coal</i>)	280.432	22.285.000.000
3	Biji Nikel (<i>Nickel Ore</i>)	10.212.622	695.129.000
4	Biji Tembaga (<i>Copper Ore</i>)	4.783	10.900.000.000
5	Kepiting dan Kerang-Kerangan (<i>Crab and Scallops</i>)	9.648	47.020.000
6	Udang (<i>Shrimp</i>)	256.618	2.780.787.000
7	Ikan Tuna (<i>Tuna</i>)	220.409	742.611.000
8	Kertas dan Barang dari Kertas (<i>Paper and Its Product</i>)	3.520	3.667.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, data telah diolah.

Delapan produk diatas merupakan produk yang telah disepakati oleh Indonesia dan Jepang dalam kerja sama NTBs, Produk tersebut disepakati sesuai dengan perjanjian IJEPA dan CEPT Skema yakni agrikultur, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan produk bahan baku atau *raw material*. Berikut adalah instrumen NTBs yang telah disepakati Indonesia dengan Jepang dalam klasifikasi *Technical Barriers* serta penerapannya, meliputi:

1. *Sanitary and Phytosanitary Barriers* (SPS) yakni perjanjian yang terkait dalam perlindungan kehidupan, kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan dari resiko tertentu yang berkaitan dengan perdagangan, seperti eksploitasi atau politik dumping. Sesuai perjanjian yang telah disepakati yaitu pemerintah Indonesia dan Jepang harus tetap memperhatikan lingkungan sekitar juga ekosistem yang ada baik pada saat sebelum produksi maupun sesudah produk tersebut jadi. Hal tersebut harus diterapkan sesuai dengan *Sanitary and Phytosanitary Barriers* (SPS) seperti tidak diperbolehkannya menggunakan bahan-bahan kimia yang

berlebihan tidak diperbolehkan baik pada saat proses produksi maupun setelah proses produksi hal ini berlaku bagi setiap sektor kerja sama termasuk delapan produk yang telah disepakati, aturan akan hal ini telah ditegaskan dalam pada *annex 2* pasal 3 IJEPA, klausa 28 mengenai *Product Specific Rules – Chemical reaction, purifications and organic or inorganic compounds of precious metals and rare-earth metals*;

2. *Technical Barriers to Trade* (TBT) adalah perjanjian yang bermaksud agar suatu negara tidak menerapkan kebijakan hambatan yang sifatnya teknis seperti tarif, standarisasi dan lainnya yang bertujuan agar negara-negara terhindar dari adanya kecurangan dalam perdagangan internasional, menjaga keamanan nasional serta hal lainnya yang merugikan negara dalam melakukan kerja sama dan aktivitas perdagangan. Pada pengaplikasian instrumen NTBs yang berkaitan *Technical Barriers to Trade* (TBT) pemerintah sangat tidak diperbolehkan dalam menerapkan adanya hambatan perdagangan seperti tarif atau standarisasi serta hambatan lainnya yang bersifat teknis. Bahkan, larangan ini dipertegas dengan dicantumkannya larangan penggunaan tarif disetiap pasal dalam perjanjian IJEPA termasuk dalam kerjasama NTBs. Akan tetapi, di dalam perjanjian dijelaskan bahwa ada beberapa produk yang boleh dikenakan tarif jika sesuai dengan kualifikasi dari nilai produk tersebut. Kualifikasi nilai produk yang dimaksud adalah jika bahan dasar dari produk tersebut mengandung organik maupun anorganik *of precious metals and rare-earth metals* (seperti didalam sebuah produk terdapat kandungan logam mulia, batu bara, tembaga, emas dan lainnya), serta boleh diterapkan dengan batasan harus berada dibawah 40% (IJEPA, 2007); dan

3. *Pre-Shipment Inspection And Other Formalities* adalah instrumen perjanjian yang termasuk kedalam *supply chain management* dan metode kontrol kualitas dari suatu produk dalam kegiatan perdagangan internasional. Instrumen perjanjian ini bertujuan untuk mengecek secara rinci sebuah pengiriman oleh suatu negara seperti kesesuaian harga, kualitas serta kuantitas produk. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pelarian modal dan penipuan komersial, penghindaran bea cukai dan lainnya yang mengancam kepentingan keuangan nasional. Perjanjian ini pula sejalan dengan aturan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), termasuk non-diskriminasi, transparansi serta lainnya. *Pre-Shipment inspection amd other formalities* dalam pengaplikasiannya yaitu pemerintah Indonesia maupun Jepang dalam kegiatan perdagangan bilateral khususnya pada delapan produk yang telah disepakati, pemerintah kedua negara ketika melakukan kegiatan perdagangan bilateral diharuskan untuk mengecek ulang mengenai kualitas produk, kuantitas produk serta pengecekan harga yang telah disepakati pada saat *pre-shipment*. Hal tersebut dilakukan agar kedua negara tidak melakukan kecurangan dalam perdagangan bilateral, dalam penerapan instrumen ini dalam perdagangan baik ekspor impor Indonesia-Jepang harus melewati tahap ini dan diatur pada artikel 35 dan artikel 28 klausa (c) IJEPA dan peraturan menteri perdagangan no. 84, 85, 83 (*Indonesia National Trade Respository:2019*).

Berikut adalah instrumen NTBs yang telah disepakati Indonesia dengan Jepang dalam Dalam klasifikasi *Non-Technical Barriers* dan penerapannya, meliputi:

1. *Non-Automatic Licensing, Quotas, Prohibitions And Quantity-Control Barriers Other Than For SPS or TBT Reasons* adalah instrumen perjanjian yang meliputi prosedur perizinan impor yang diberlakukan sebagai tindakan

non teknis selain *Sanitary and Phytosanitary Barriers* (SPS) atau *Technical Barriers to Trade* (TBT), perizinan ini meliputi dua hal yakni lisensi untuk alasan ekonomi serta lisensi untuk alasan non-ekonomi. Pada bagian *Non-Automatic Licensing, Quotas, Prohibitions And Quantity-Control Barriers Other Than For SPS or TBT Reasons*, penerapannya hanya berlaku pada produk perikanan dan tangkapan laut yang diperdagangkan oleh Indonesia dengan Jepang, peraturan ini mengatur bagaimana masuk serta keluarnya produk laut dari wilayah teritorial laut kedua negara dan diatur pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 12/MEN/2011 artikel 2 pasal 4 (*Indonesia National Trade Respository:2019*);

2. *Intellectual Property*, sesuai dengan yang dipaparkan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties of Government* bahwa perjanjian ini berkaitan dengan hak kepemilikan akan suatu hal baik *tangible* dan *intangible* dan hak kepemilikan akan hal tersebut adalah hak mutlak yang telah dimiliki sejak lahir oleh setiap manusia (Locke, 1988:285). Pada bagian *Non-Automatic Licensing, Quotas, Prohibitions And Quantity-Control Barriers Other Than For SPS or TBT Reasons*, penerapannya hanya berlaku pada produk perikanan dan tangkapan laut yang diperdagangkan oleh Indonesia dengan Jepang, peraturan ini mengatur bagaimana masuk serta keluarnya produk laut dari wilayah teritorial laut kedua negara dan diatur pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 12/MEN/2011 artikel 2 pasal 4 (*Indonesia National Trade Respository:2019*); dan
3. *Rules of Origin* (RoO), merupakan perjanjian untuk suatu negara dapat menentukan asal barang atau biasa disebut penentuan ‘kebangsaan’ dari suatu produk dengan membedakan sumber atau asal dari produk tersebut

(Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, 2019:1). *Rules of Origin* (RoO) adalah instrumen yang mengatur kebangsaan dari suatu produk yang dijelaskan dalam Bab 3 IJEPA yang mengatur mengenai *shipping*, spesifikasi produk, *Certificate of Origin* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebangsaan suatu produk, hal ini untuk mengetahui asal dari produk tersebut sehingga ada pandangan tarif yang berlaku pada produk tersebut seperti yang diatur pada artikel 40 IJEPA tentang *claim for preferential tariff treatment* (IJEPA, 2007). Pada penerapannya sesuai dengan yang diatur oleh *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP)* bahwa klasifikasi RoO akan terpenuhi apabila produk kandungan regional (*regional value content*) 40% dari nilai barang di lokasi penjual (*free on board*) (AJCEP Annex 5-*Principles and Guidelines for Calculating Regional Value Content on the ASEAN Trade in Goods Agreement*).

4.1.2. Kebijakan *Non Tariff Barriers* Indonesia-Jepang 2008-2015

Kerjasama *Non Tariff Barriers (NTBs)* antara Indonesia dengan Jepang Pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang menjadi awal dari kerjasama strategis atau yang biasa disebut sebagai *strategic partnership* yang dijalin oleh Indonesia dengan Jepang. Kerjasama strategis yang dijalin Indonesia dengan Jepang ini diwujudkan dengan disepakatinya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* pada Agustus 2007. IJEPA mengawali semua kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jepang termasuk terbentuknya kesepakatan atas respon terhadap fenomena pasar bebas, yaitu kerjasama *Non Tariff Barriers (NTBs)*. Menurut data yang dipublikasi melalui Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Republik Indonesia, bahwa

terdapat 69 perjanjian kerja sama, 61 diantaranya adalah perjanjian yang tanpa harus ada ratifikasi dan notifikasi dan 8 adalah perjanjian yang perlu ratifikasi dan notifikasi dari pemerintah pihak yang meratifikasi yaitu Indonesia dan Jepang termasuk kerja sama IJEPA dan *Non Tariff Barriers* yang tercantum didalamnya.

Kerja sama yang telah dijalin oleh Indonesia dengan Jepang menunjukkan seberapa erat dan pentingnya hubungan kedua negara. Kerja sama strategis yang dilakukan oleh kedua negara memiliki keuntungan bagi masing-masing negara. Indonesia membutuhkan kerja sama ini untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian domestik setelah sebelumnya Indonesia mengalami bencana alam yang sangat besar, yaitu Tsunami pada tahun 2004 di Aceh. Kerja sama ini pula membantu Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar hingga ke kawasan Asia Timur, setidaknya produk Indonesia telah memiliki akses disetiap negara di kawasan Asia Timur. Bagi Jepang, tsunami yang terjadi di Aceh, Indonesia pada tahun 2004 jika dilihat menggunakan perspektif neoliberalism menjadi sebuah batu loncatan bagi Jepang untuk memperluas pasar khususnya dalam bidang automobil dan teknologi, serta kesempatan awal bagi Jepang untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Hal tersebut, dapat dilihat melalui jumlah dan persentase kerja sama pada setiap sektor yang Indonesia jalin dengan Jepang.

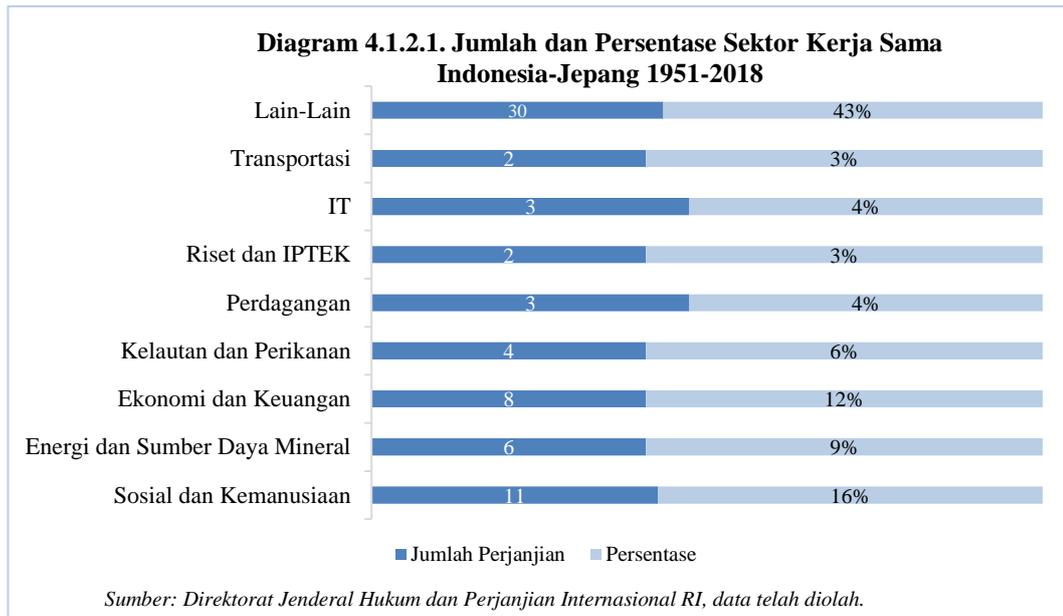


Diagram diatas menunjukkan bahwa pada saat ini kerja sama Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan hanya memiliki 8 perjanjian saja serta kerja sama perdagangan Indonesia dan Jepang hanya memiliki 3 perjanjian atau setara dengan 4% saja. Sedangkan, untuk sektor yang menyangkut kerja sama regional ASEAN sendiri kedua negara belum memiliki satupun perjanjian atas kerja sama baik pada sektor ekonomi-ASEAN, politik dan keamanan-ASEAN dan lainnya. Indonesia juga sudah memiliki 6 perjanjian yang mengatur kerja sama pada bidang energi dan sumber daya mineral yang saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menfokuskan pada sektor ini demi mendukung terlaksananya *green economy* dan pengurangan gas emisi rumah kaca. Pada sektor seperti IT, riset dan IPTEK, Indonesia dan Jepang terikat pada 3 perjanjian disektor IT serta 2 perjanjian di sektor riset dan IPTEK.

Kerangka kerja sama Indonesia dengan Jepang khususnya pada kerja sama NTBs, Indonesia dan Jepang menyepakati beberapa sektor yaitu sektor agrikultur, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral dan produk bahan baku

atau *raw material*. Kesepakatan yang telah disetujui oleh Indonesia dengan Jepang mencakup enam instrumen perjanjian NTBs. Enam instrumen NTBs ini adalah instrumen yang seharusnya membantu peningkatan nilai dan volume perdagangan kedua negara, namun adanya kemauan Indonesia untuk lebih mendorong kerja sama kedua negara sepertinya tidak menjadi penawaran yang dianggap berarti oleh Jepang, pasalnya hingga tahun 2015 status kerja sama Jepang dengan Indonesia masih berada pada level kemitraan strategis saja dan belum ada inisiasi yang dapat menggambarkan bahwa keduanya akan meningkatkan level kemitraan menjadi kemitraan strategis spesial.

4.2. Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia

Politik bebas-aktif, begitu Soekarno menyebutnya pada saat itu. Politik bebas-aktif jika di pahami maknanya tidak hanya sebatas pada makna ‘bebas’ yang artinya tidak memihak tapi makna ‘bebas’ sesungguhnya lebih dari hal itu, ‘bebas’ melambangkan bahwa Indonesia telah merdeka dan berhak menentukan segala tindakan dalam merespon fenomena internasional, hal tersebutlah yang menjadi landasan fundamental bagi para pemimpin yang sekarang dalam membuat kebijakan. Sedangkan, makna ‘aktif’ tidak hanya sebatas aktif dalam berbagai kegiatan internasional tetapi juga Indonesia mau ikut mengambil peran penting dalam setiap hal yang terjadi di dunia Internasional. Politik bebas-aktif yang dipakai hingga saat ini sebagai landasan fundamental dalam menentukan dan membuat kebijakan telah membuat dinamika ekonomi-politik Indonesia baik domestik dan internasional menjadi semakin menarik untuk dibahas.

Pada tahun 2008, dalam dinamika politik internasional dibawah pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nama Indonesia mulai

lebih dikenal dalam dunia politik internasional. Pada masa ini, Indonesia mulai fokus pada isu perdamaian khususnya bagi Palestina. Pada tahun 2008 pula Indonesia juga terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), tidak hanya itu saja dalam isu nuklir Iran, presiden SBY berani mengambil tindakan untuk menyetujui 1747 mengenai pemberian sanksi pada Iran atas isu nuklirnya tanpa takut akan berdampak dinamika politik domestik Indonesia (Mietzner, 2009:152-154).

Pada era pemerintahan SBY ada hal yang sangat perlu disayangkan. Pada periode satu masa pemerintahannya, masyarakat sangat tidak puas akan kinerja perekonomian Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya *hyper* inflasi yang berdampak tidak hanya pada perekonomian domestik tetapi juga berdampak pada sektor-sektor penting yang dimiliki oleh Indonesia, seperti pada sektor minyak mentah yang mengalami penurunan harga yang drastis, yang disebabkan harga minyak dunia yang juga mengalami penurunan yang drastis.

Pada era ini pula, SBY sangat giat dalam menyuarakan slogan kebijakan luar negerinya, yakni “*zero enemy, million friends*” atau yang dikenal pula sebagai prinsip kebijakan luar negeri *good neighborhood*. Slogan ini menjadi visi kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu untuk membuat *emotional ties* antara Indonesia dengan negara lain khususnya negara-negara pada regional ASEAN yang ditunjukkan dengan diratifikasinya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada akhir tahun 2008. Pada Juli 2009, kontribusi Indonesia pada dunia Internasional khususnya regional ASEAN semakin terlihat dengan keterlibatan Indonesia dalam mendirikan *the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) (D.F. Anwar, 2010:134). Di tahun 2008 dan 2009 pula pemerintah Indonesia

disibukkan dengan agenda-agenda Internasional yang telah diadakan di Bali, Indonesia.

Bali Demokrasi Forum (BDF), adalah salah satu diplomasi publik Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi demokrasi, tidak hanya itu BDF juga sebagai wadah diskusi dan promosi mengenai demokrasi yang isinya adalah negara-negara yang sudah menerapkan demokrasi dan negara-negara yang ingin menerapkan demokrasi. Pengaruh, Indonesia dibawah administrasi presiden SBY selama dua periode kepemimpinan, Indonesia memberikan pengaruh yang besar tidak hanya bagi negara-negara di ASEAN tetapi juga bagi negara-negara di luar ASEAN, seperti Tiongkok yang saat ini sudah ikut menganut prinsip kebijakan luar negeri *good neighborhood*.

Pada era kepemimpinan yang selanjutnya, era presiden Jokowi; presiden Jokowi memiliki ciri khas serta slogan khususnya dalam penerapan arah politik luar negerinya. Keluarnya rancangan kerja prioritas pemerintah pada masa presiden Jokowi dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bagi kebijakan luar negerinya. Hal tersebut telah menjadi sebuah visi Indonesia sebagai negara maritim terbesar, Indonesia memiliki hak atas kedaulatan wilayah lautnya. Jauh pada era kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya, Indonesia sangat jarang menyoroti wilayah kedaulatan lautnya. Pada era ini dibawah kepemimpinan presiden Jokowi, ia menyerahkan tanggung jawab kedaulatan wilayah laut Indonesia kepada seorang kartini milenial, Susi Pudjiastuti. Susi Pudjiastuti didaulat sebagai menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan kabinet 2014-2019.

4.2.1. Dinamika Empat Sektor Indonesia yang Disepakati dalam NTBs

4.2.1.1. Sektor Kelautan Indonesia

Dinamika yang terjadi pada sektor kelautan Indonesia telah berkembang pesat. Hal tersebut terbukti sejak didaulatnya Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada kabinet Jokowi. Dalam *track record* karirnya Menteri Susi menunjukkan progres yang sangat besar khususnya bagi hasil tangkapan laut Indonesia. Menteri Susi berani melakukan tindakan tegas dalam menangani masuknya kapal-kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah teritorial laut Indonesia tanpa ada izin berlayar. Progres tersebut terlihat di dua tahun awal masa jabatannya dalam kabinet Jokowi. Berikut grafik perbandingan jumlah produksi tangkapan laut Indonesia periode 2008-2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, data telah diolah.

Peningkatan yang dicapai menteri Susi merupakan salah satu pencapaian terbesar bagi Indonesia, tidak hanya pada peningkatan jumlah tangkapan laut saja, tetapi hal tersebut lebih dari itu. Melihat hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi sektor perekonomiannya khususnya pada sektor perikanan dan kelautan. Sedikit saja pemerintah Indonesia salah mengambil langkah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, maka sumber daya itu akan dieksploitasi oleh negara lain. Hal tersebut juga dapat

dikatakan dengan alasan bahwa dengan kebijakan yang diterapkan Indonesia dapat meningkatkan ekspor pada sektor jumlah produksi tangkapan laut, baru dua tahun kebijakan ini diterapkan, produksi meningkat pesat sebesar 9%, dan jika dibandingkan dengan jumlah produksi tangkapan laut pada tahun 2008-2015 Indonesia telah memiliki peningkatan yang sangat pesat hingga mencapai angka 32% (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2015:1).

4.2.1.2. Sektor Agrikultur Indonesia

Sektor yang kedua yakni pada sektor Agrikultur pemerintah Indonesia sejak terjadinya krisis finansial 2008 mulai mengembangkan dan meningkatkan sektor ini, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sektor agrikultur merupakan sektor yang juga tepat bagi Indonesia untuk dijadikan sebagai sektor unggulan yang dapat dijadikan produk unggul dalam perdagangan internasional. Sektor ini dapat dikatakan memiliki potensi yang sangat besar kedua setelah sektor kelautan, karna Indonesia adalah negara kepulauan yang berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis yang berpotensi kaya akan tumbuh-tumbuhan. Berikut adalah grafik perkembangan sektor agrikultur di Indonesia.

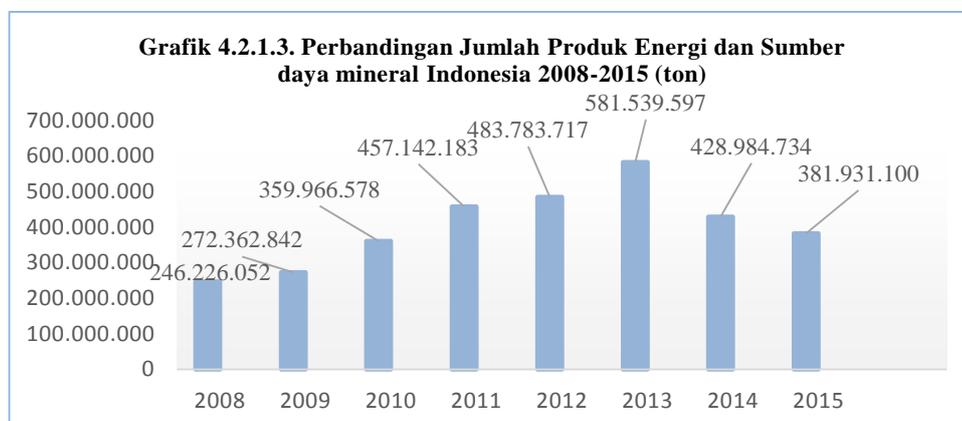


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ministry of Foreign Affairs of Japan, data telah diolah.

Peningkatan yang terjadi pada sektor ini yang mencapai 38% sejak tahun 2008 hingga 2015, menunjukkan bahwa sektor ini telah mengalami perkembangan yang signifikan terlebih setelah terjadinya krisis finansial pada tahun 2008 dan terus berkembang serta membantu menyokong perekonomian domestik Indonesia. Hal ini menurut penulis menjadi acuan pemerintah dalam menjadikan sektor agrikultur sebagai sektor yang menjanjikan dalam kerja sama perdagangan Indonesia dengan Jepang (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015:1).

4.2.1.3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

Sektor energi dan sumber daya mineral menjadi fokus pemerintah Indonesia pula, sektor ini menjadi fokus perhatian sebab sektor ini merupakan sektor yang menjanjikan dalam perkembangan dalam perekonomian Indonesia akan tetapi dalam pengelohannya tidak hanya Indonesia tetapi rata-rata yang terfokus pada sektor ini akan mengalami masalah peningkatan gas emisi rumah kaca. Permasalahan tersebut pula yang menurut penulis menjadi sektor yang masuk kedalam kesepakatan kerja sama perdagangan dan kebijakan NTBs antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Berikut adalah grafik perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ministry of Economic, Trade and Industry of Japan (METI), data telah diolah.

Pada grafik diatas, jumlah produk energi dan sumber daya mineral Indonesia telah mengalami dinamika fluktuasi yang dapat dikatakan bahwa Indonesia juga mengalami penurunan dan juga peningkatan yang drastis. Jumlah peningkatan produk energi dan sumber daya mineral dari 2008-2015 bahkan mencapai 55% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015:1).

4.2.1.4. Sektor Bahan Baku atau *Raw Material* Indonesia

Sektor yang terakhir yang juga menjadi fokus pada kerja sama perdagangan NTBs antara Indonesia dengan Jepang yakni sektor bahan baku atau *raw material*, sektor ini adalah sektor yang seringkali dijadikan sektor unggulan negara-negara berkembang dalam menjalin hubungan kerja sama dagang internasional dan membuat negara-negara berkembang bersaing dalam menghasilkan produk bahan baku yang berkualitas agar negara-negara maju yang kemudian akan mengolahnya menjadi tertarik untuk membeli produk bahan baku yang berkualitas dari negara-negara berkembang. Bahan tambang serta bahan-bahan baku yang berasal dari tumbuh-tumbuhan juga termasuk pada sektor ini, telah menjadikan Indonesia sebagai *supporting country* dalam pembuatan produk jadi, tetapi Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ini, karena produk bahan baku serta produk jadi harganya tentu lebih mahal dipasar. Berikut adalah grafik produk bahan baku Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Japan International Cooperation Agency, data telah diolah.

Dari Grafik 4.2.1.4. jumlah produk bahan baku Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejak tahun 2008-2015 Indonesia mengalami peningkatan sebesar 29% pada sektor ini (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015:1).

Melihat dinamika ekonomi-politik baik domestik maupun luar negeri, penulis dapat menganalisis bahwa Indonesia secara jelas sedang pada masa pemulihan setelah terjadinya *hyper* inflasi khususnya pada tahun 2008 hingga pasca terjadinya *hyper* inflasi, menurut penulis salah satu cara untuk memulihkan keadaan perekonomian domestik, Indonesia memiliki untuk berperan aktif pada aktivitas-aktivitas internasional. Indonesia memanfaatkan peluang dengan aktif pada agenda Internasional dengan motif mencari jaringan serta menjalin kerja sama dengan negara-negara yang terlibat dalam agenda yang sama.

Setelah jatuhnya keadaan perekonomian yang terjadi Indonesia akibat adanya *hyper* inflasi serta kurang berkembangnya aktivitas yang terjadi pada *stock market* di Indonesia, Indonesia kemudian mengambil langkah yang menurut penulis sangatlah tepat untuk meratifikasi piagam ASEAN serta menjadi tuan rumah untuk menunjang terlaksananya agenda *promoting democracy*, Bali Demokrasi Forum (BDF), tetapi salah satu motif yang di yakini oleh penulis yaitu agar negara-negara melihat sisi lain dari Indonesia, sisi selain sebagai negara yang menjunjung tinggi

demokrasi, Indonesia juga negara yang aman serta memiliki iklim yang baik untuk berinvestasi dan menjalin kerja sama.

Hal tersebut terbukti secara kuat bahwa Indonesia mengutamakan kerja sama untuk membangun perekonomian domestik yang dilihat dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Presiden SBY. Demi mencapai kepentingan nasionalnya Indonesia berusaha menjalin hubungan yang baik khususnya dengan negara-negara tetangga. Setelah Indonesia dapat kembali bangkit dari masalah perekonomiannya barulah pada era kepemimpinan yang baru, tidak hanya di bidang politik domestik dan luar negeri saja tetapi di era kepemimpinan baru Presiden Jokowi berani untuk memfokuskan kebijakannya dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan alasan yang sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar.

Setelah memfokuskan kebijakan melalui sektor maritim, barulah Indonesia mulai merasakan sebagai negara kepulauan terbesar. Kebijakan tersebut juga menunjukkan kepada negara tetangga terlebih dalam kasus pelanggaran wilayah kedaulatan laut, Indonesia mulai menunjukkan tindakan ofensif terhadap para penangkap ikan liar di wilayah kedaulatan laut Indonesia, hal tersebut juga berpengaruh pada sektor lainnya yang menjadi fokus kerja sama Indonesia dengan Jepang yang terikat dalam IJEPA.

Setelah Indonesia mengalami hiperinflasi 1997-1998, Indonesia kemudian kembali bangkit dalam membangun perekonomiannya. Pada september 2008, dunia internasional mengalami krisis. Krisis yang terjadi bermula dari adanya kebijakan “*subprime lending*” yang diterapkan oleh Amerika Serikat, pada dasarnya kebijakan ini bermaksud untuk memberikan pinjaman bagi masyarakat Amerika yang membutuhkan bantuan dana, namun pinjaman tersebut diberikan tanpa adanya

waktu jatuh tempo bagi peminjamnya sehingga bank-bank yang memberikan pinjaman tersebut mengalami krisis.

Melihat hal tersebut kemudian penulis melihat bagaimana posisi Indonesia dalam kerja sama yang dijalin dari awal terbentuknya IJEPA hingga tahun 2015, jika dilihat sejak terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004, Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang sosial dan kemanusiaan secara besar-besaran termasuk dengan Jepang serta pembangun kerja sama pada bidang ekonomi dan finansial untuk memperbaiki keadaan perekonomian domestik pasca tsunami Aceh 2004. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia ketika Jepang mengalami bencana alam yaitu gempa, tsunami yang kemudian disusul dengan meledaknya salah satu reaktor nuklir milik Jepang pada tahun 2011, hal tersebut jika dilihat menggunakan perpektif neoliberalism memang secara harfiah Indonesia ingin membalas budi Jepang pada saat terjadinya bencana tsunami Aceh 2004 namun, penulis melihat ada titik balik kepentingan yang ingin Indonesia capai pada saat presiden SBY melakukan kunjungan diplomatik sebagai simbol belasungkawa masyarakat Indonesia atas bencana yang menimpa Jepang, yakni untuk menjalin kerja sama ekonomi.

4.2.2. Perkembangan Ekspor Indonesia

Pada saat Indonesia mengalami kekacauan finansial hal serupa tidak begitu dialami oleh negara tetangganya, yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand. Ketiga negara tersebut walaupun mengalami krisis finansial tetapi tidak separah yang dialami oleh Indonesia. Pasar saham di Indonesia kehilangan lebih dari setengah nilai saham yang dimiliki pada 2008. Sektor perdagangan, jasa dan investasi di Indonesia jatuh secara drastis hingga menyentuh angka 65.66% (*World Bank*

Publications Document, 2018:11-12). Jatuhnya perekonomian Indonesia akibat efek dari adanya fenomenan krisis global tidak membuat Indonesia menerima keadaan itu begitu saja, jatuhnya *market share* Indonesia yang membuat turunnya permintaan atas ekspor produk Indonesia.

Munculnya kebijakan *safeguard* yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menahan lonjakan impor tanpa menyalahi aturan yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO) telah berhasil membantu Indonesia bertahan dari rezim perdagangan bebas, kebijakan ini membantu Indonesia menyeimbangkan perdagangan (ekspor-impor) serta *Balance of Payments* (BoP) Indonesia. Dengan menurunnya nilai ekspor yang berhasil diatasi dengan menyeimbangkan hal tersebut dengan kebijakan *safeguard* sehingga seimbang antara permintaan ekspor serta masuknya produk impor ke dalam negeri membuat Indonesia dapat bangkit dari krisis global di tahun 2009. Hal tersebut berhasil ditunjukkan Indonesia dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2009 sebesar 4.2% (Basri dan Rahardja, 2010:79).

Usaha yang dilakukan oleh Indonesia memang tidak langsung membuahkan hasil. Penyeimbangan keadaan ekonomi serta harga rupiah untuk menunjang BoP Indonesia dengan menyesuaikan produk impor dan ekspor melalui kebijakan *safeguard* tidak terjadi hanya dalam sekejap saja tetapi Indonesia butuh waktu sampai lebih kurang lima tahun untuk dapat mengembalikan keadaan perekonomiannya hal ini terbukti dengan menguatnya nilai tukar rupiah pada januari 2014 dan selalu mengalami peningkatan hingga akhir 2018 rupiah menguat dan mencapai persentase 5.3%.

Penguatan nilai tukar tersebut juga mempengaruhi adanya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dilihat melalui GDP yang meningkat setiap tahunnya

hingga mencapai persentase 5.2%. Hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap perkembangan impor Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang sangat drastis, impor Indonesia berada pada rentan persentase yang stabil tiap tahunnya sebesar 11-12%, namun angka persentasi tersebut tidak sebanding dengan ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia jika dilihat dari segi positif mengalami peningkatan yang dapat dikatakan cukup pesat berada pada rentan persentase 6-8% tetapi jika hal ini disandingkan dengan impor, Indonesia masih kurang dalam kinerja penggerak pertumbuhan ekspornya (*World Bank Publications Document*, 2018:10-16). Melihat *timeline* jalinan kerja sama yang berusaha dibangun oleh Indonesia terhadap Jepang yang telah dipaparkan pada halaman 33-35, membuat penulis berusaha untuk melihat dimanakah posisi Jepang dalam perdagangan Indonesia. Berikut adalah sebaran persentase perdagangan Indonesia ke negara-negara di Asia.

Gambar 4.2.2. Persentase Perdagangan Indonesia di Asia



Melihat map persentase di atas mengenai perdagangan Indonesia di kawasan Asia, Jepang menempati posisi kedua setelah Tiongkok dengan meraih total perdagangan

sebesar 10% atau setara dengan 19 milyar US\$. Hal tersebutlah menurut penulis membuat Indonesia mau untuk membuat kemitraan strategis dengan Jepang. Posisi Jepang yang menurut Indonesia sangat strategis membuat Indonesia secara berkelanjutan membuat rancangan pengembangan kerja sama perdagangan dengan Jepang dari *Strategic Partnership* menjadi *Special Strategic Partnership*.

4.3. Dinamika Ekonomi-Politik Jepang

Dinamika ekonomi-politik yang terjadi di Jepang sangat jarang terekspos baik oleh media cetak maupun media digital. Sejak adanya reformasi pemilu di Jepang tahun 1994 hanya ada dua partai yang saat ini masih mendominasi perpolitikan di Jepang yaitu Partai Demokratik Jepang atau yang dikenal sebagai *Democratic Party of Japan* (DPJ) dan Partai Liberal Demokratik atau yang dikenal sebagai *Liberal Democratic Party* (LDP) dan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe berasal dari partai ini (Hayes, 2012:185-186). Sejak pemerintahan di pegang oleh PM Shinzo Abe yang berasal dari LDP tentunya kebijakan yang ia buat juga memiliki karakteristik dari sifat dan ideologi LDP yang terfokus pada hak-hak demokratis serta permasalahan ekonomi dan teknologi informasi.

Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh PM Shinzo Abe perlahan bergeser tidak hanya terfokus pada hak-hak demokratis dan permasalahan ekonomi saja namun, sejak terjadi tsunami Jepang tahun 2011 yang kemudian disusul oleh meledaknya salah satu reaktor nuklir Fukushima Daiichi, membuat pemerintah Jepang memperluas pembuatan kebijakannya dengan menambahkan fokus permasalahan lingkungan dan bencana alam. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang pun beragam, salah satunya adalah kebijakan yang Jepang terapkan bagi pemerintahnya, yaitu kebijakan *digital government*. *Digital Government*

bermula sejak adanya slogan yang selalu di promosikan dari masa ke masa oleh setiap Perdana Menteri Jepang termasuk PM Shinzo Abe yang juga masih mempromosikan slogan tersebut, slogan tersebut berbunyi “*Advanced-Information-Technology-driven administration*” dan lebih di kenal sebagai *Digital Government* (Hideaki, 6).

Penerapan *Digital Government* oleh pemerintah Jepang di mulai dengan penerapan pemilihan umum yang menggunakan sistem internet yang kemudian menuai pro dan kontra oleh masyarakat Jepang, pasalnya ada dugaan monopoli oleh elit politik LDP terhadap hasil pemilihan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Pro dan kontra yang terjadi yakni para masyarakat Jepang yang pro pada sistem ini menganggap bahwa kemajuan teknologi dapat mempermudah segala aktivitas termasuk pemilihan umum yang dilakukan serentak di seluruh Jepang, masyarakat juga beranggapan bahwa demokrasi juga dapat dirasakan dengan praktis tanpa mengurangi atau mengganggu kegiatan sehari-hari yang sangat sibuk oleh karena hal tersebut Jepang dikenal dengan etos kerja yang tinggi. Akan tetapi, untuk masyarakat yang kontra hal tersebut dianggap tidak sah dan tidak transparan, pasalnya suara yang dipilih dengan menggunakan teknologi digital dapat dengan mudah di manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kasus ini pada dasarnya bukanlah isu baru tetapi isu lama yang hingga saat ini masih belum menemui penyelesaian, tetapi pihak pemerintah dan penyelenggara pemilu di Jepang menyatakan bahwa hal mengenai keamanan atas hasil voting masyarakat Jepang terus diperbarui dan dikembangkan.

Pengembangan dan pembaruan teknologi informasi di Jepang memberikan efek yang cukup luas baik pada sektor infrastruktur, pendidikan serta sektor vital seperti ekonomi, sosial budaya serta politik. Pengembangan teknologi informasi di

Jepang memiliki respon positif terlebih sejak pemerintah menyatakan diri sebagai *digital government* dan mulai menyuarakan slogan “*Advanced-Information-Technology-driven administration*”, pihak-pihak yang berasal dari sektor swasta memberikan respon positif untuk ikut bekerja sama baik dalam penggunaan serta pengembangan teknologi informasi. Adanya dukungan dari pihak swasta membuat pemerintah merambah ke sektor ekonomi di masyarakat agar berkembangnya pemberdayaan masyarakat di Jepang.

Pemerintah mulai mengenalkan fungsi, manfaat serta penggunaan teknologi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau *Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)*. Kementerian Perdagangan dan Industri (*Ministry of Economy, Trade and Industry/METI*) Jepang mengembangkan penelitian mengenai skema sistem inovasi-promosi pada UKM yang diberi nama *Small Business Innovation Research (SBIR)*, sistem yang di hasilkan melalui penelitian ini bertujuan agar dapat membantu UKM untuk dapat meningkatkan kapabilitas pengembangan teknologi dan untuk mendukung kegiatan kreativitas bisnis pada UKM (Goto, 2009:36).

Perkembangan sistem tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, secara logika sistem tersebut secara khusus dibuat untuk memajukan perekonomian melalui UKM yang ada di Jepang, akan tetapi isu yang berkembang justru mengenai adanya unsur politik pemerintah dalam penyaluran serta pelaksanaan sistem tersebut, banyak orang juga sudah mengkritik bahkan memberi julukan bagi isu tersebut, yakni mereka menyebutnya dengan ‘*Abenomics*’, dalam kasus ini Abe yang telah menjabat pada periode awal 2007-2008 baru menerapkan ‘*Abenomics*’ pada periode masa jabatan kedua tahun 2012-2013, dan memberlakukan beberapa komponen penting yakni mendorong adanya kenaikan pajak penjualan sebesar

10%, hal tersebut diharapkan dapat membantu mereformasi sistem jaminan sosial dalam menghadapi peningkatan populasi yang menua serta meningkatnya hutang nasional (*The Diplomat*, 2018:1).

Dinamika ekonomi-politik Jepang pada dasarnya memiliki dinamika yang kompleks jauh sebelum munculnya 'Abenomics'. Dinamika tersebut dilihat melalui konflik politik Jepang di tengah kerja sama dan pola struktur pembangunan ekonomi yang telah dimulai sejak tahun 1939 dengan munculnya disrupsi ekonomi akibat adanya perang dunia kedua dan munculnya *bubble economy* pada pasar saham Jepang serta tingkat umur produktif yang ada di Jepang telah menjadi permasalahan mendasar bagi masyarakat Jepang. Adanya krisis finansial global juga menuntut pemerintah Jepang untuk dapat segera membangun perekonomian terlebih setelah turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 200% per rasio GDP Jepang (Yoshino dan Hesary, 2014:38).

Sejak saat tersebutlah pemerintah Jepang semakin berambisi dalam membangun perekonomian. Tepatnya pada tahun 2012, 'Abenomics' dibedakan kedalam tiga seperangkat kebijakan yang disebut sebagai "*Three Arrows*", yaitu percepatan kebijakan moneter (tindakan BOJ dalam menekan inflasi hingga 2%), penguatan fiskal, serta strategi pertumbuhan dengan membuat reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. (Yoshino dan Hesary, 2014:38). Naiknya tingkat pertumbuhan usia tua di Jepang membuat negara ini menanggung tingkat biaya kesejahteraan yang sangat besar bagi masyarakatnya.

Keadaan tersebut yang membuat Jepang harus berhutang kepada negara-negara kaya, dengan hutang pemerintah Jepang yang dua kali lebih besar dibandingkan keadaan ekonomi nasional. Permasalahan kemudian muncul, pemerintah Jepang harus menghasilkan uang untuk membayar hutang tetapi juga

membutuhkan biaya yang besar juga bagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat usia tua. Hal tersebutlah yang membuat Abe berfikir bahwa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan membuat Jepang dapat mengurangi hutang yang telah menumpuk dengan alasan pemerintah akan lebih mudah mengumpulkan pajak pendapatan atas hasil pertumbuhan ekonomi atau secara singkat bahwa Abe menganggap dalam jangka waktu yang pendek hingga menengah pertumbuhan merupakan hal yang perlu diutamakan dibandingkan urusan fiskal (CNN Bisnis, 2017:1).

Pada 22 Januari 2013, Pemerintah Jepang dengan Bank Sentra atau *Bank of Japan* (BOJ) melakukan *joint statment* dalam rangka mengatasi deflasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Jepang dan BOJ sepakat untuk menetapkan konsumis pemerintah bertahan pada angka 2% dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi konsumsi pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat (Yoshino dan Hesary, 2014:39).

Naiknya harga produk domestik telah membuat tingkat kompetitif industri domestik juga ikut naik, terlebih hal tersebut juga didorong naiknya harga energi dan minyak dunia. Hal tersebut yang kemudian memunculkan platform inovasi berdasarkan strategi pertumbuhan ekonomi oleh Abe. *Abenomics* kemudian muncul dengan membawa metode baru dalam membangun dan mengembangkan bisnis yang memiliki resiko tinggi serta usaha kecil dan menengah (UKM).

Pemerintah Jepang lalu memberikan manuver pada kebijaka luar negerinya, yaitu *Advanced-Information-Technology-driven administration*. Kebijakan yang pemerintah Jepang yang diambil untuk menjadikan teknologi informasi menjadi sektor utama dalam membangkitkan sektor usaha domestik untuk menunjang

strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adanya hal yang Tokyo terapkan tersebut tidak hanya pada perusahaan besar untuk berinovasi melalui teknologi, tetapi juga diterapkan pada masyarakat Jepang khususnya pada sektor UKM.

Pada Januari 2014, Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso mengidentifikasi ada beberapa aspek utama dalam strategi pertumbuhan Jepang, yaitu pemerintah Jepang memastikan bahwa UKM memiliki akses yang mudah dalam melakukan riset dan pengembangan, pemerintah Jepang akan memberikan dana yang cukup bagi para petani yang semakin tua untuk menjamin dan memastikan pertanian yang efisien serta menjadi sektor yang kompetitif, untuk menutupi peningkatan pengeluaran untuk jaminan sosial, pemerintah Jepang akan menaikkan pajak, target defisit pemerintah pada tahun 2015 harus berada pada setengah dari angka defisit ditahun 2010 dan harus berada pada angka nol pada tahun 2020 dan lainnya (Yoshino dan Hesary, 2014:44-45)

Setelah adanya kebijakan tersebut Jepang tidak begitu terfokus pada sektor perdagangan, Jepang justru lebih berfokus pada sektor ekonomi domestik. Sedangkan, Dinamika pertumbuhan perekonomian yang terjadi di Jepang tidak terlepas dari tantangan yang dihadapinya, sesuai dengan yang dipaparkan oleh F. Gerard Adams dalam bukunya yang berjudul *Accelerating Japan's Economic Growth* (2007:23) yang secara garis besar ada dua tantangan fundamental yang dihadapi Jepang dalam membangun pertumbuhan ekonominya, yaitu:

1. *Tingkat Populasi dan Tenaga Kerja yang Menua*, tingginya tingkat usia tua pada populasi dan tenaga kerja yang ada di Jepang menjadi isu yang serius, sejak rendahnya angka kelahiran yang terjadi di Jepang. Menurut data publikasi *Populations Projection for Japan: 2001-2050* (2002:1-29) total

pertumbuhan populasi di Jepang mengalami penurunan tiap tahunnya yang awalnya hanya mengalami 0,3% menjadi 0,5%. Usia produktif 15-64 mengalami penurunan yang sangat cepat antara 0,7% hingga 0,9%. Hal tersebut juga berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi yang terus menurun sebanyak 0,9%.

Tabel 4.3. Trend Proyeksi Demografi Jepang

Tahun	Umur Rata-Rata (Tahun)	Total Populasi Tahunan (%)	Populasi Usia Produktif Tahunan (%)
1980-an (Aktual)	35.8	0.6	0.9
1990-an (Aktual)	39.5	0.3	0.0
2000-an (Aktual)	43.0	0.0	-0.5
2010-an (Proyeksi)	45.9	-0.3	-0.9
2020-an (Proyeksi)	48.2	-0.5	-0.7

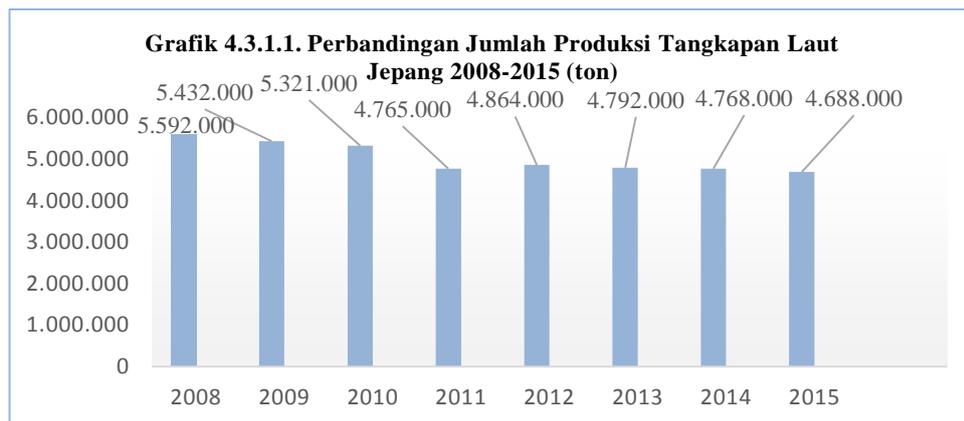
Sumber: *Populations Projection for Japan: 2001-2050, data telah diolah.*

2. *Tantangan Fiskal*, tingginya usia produktif yang ada di Jepang, telah membuat Jepang mengalami keadaan yang sulit dibidang fiskal. Kesulitan yang dihadapi Jepang ini berdampak pada pertumbuhan GDP yang melambat serta penerimaan pajak yang juga perlahan ikut menurun seiring melambatnya pertumbuhan GDP masyarakat Jepang.

4.3.1. Dinamika Empat Sektor Jepang yang Disepakati dalam NTBs

4.3.1.1. Sektor Kelautan Jepang

Sektor pertama yang akan dilihat, yaitu sektor kelautan dan perikanan Jepang yang dilihat melalui jumlah produksi tangkapan laut Jepang dari tahun 2008 hingga 2015. Jepang yang memiliki wilayah teritorial laut yang luas yang dikelilingi oleh samudera pasifik ini, telah menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam perdagangannya dengan negara-negara lain. Berikut adalah grafik produksi tangkapan laut Jepang 2008-2015.



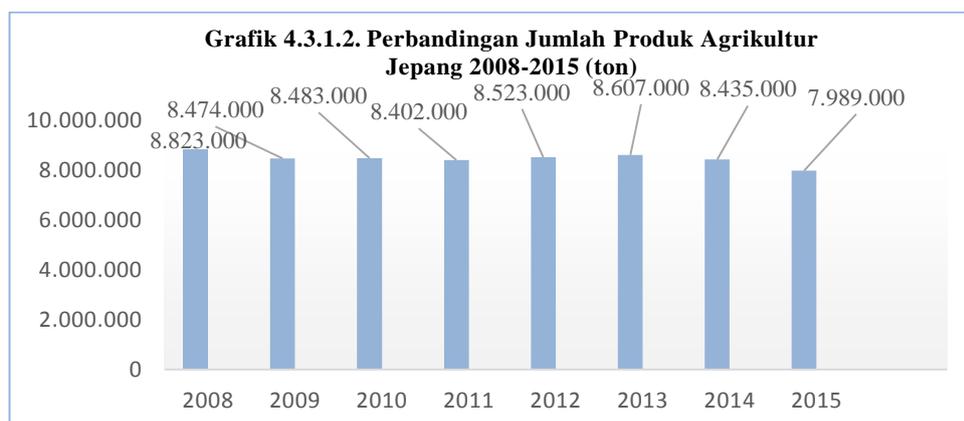
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jepang dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF), data telah diolah.

Grafik perbandingan diatas menunjukkan bahwa keadaan jumlah produksi tangkapan laut Jepang tidaklah begitu buruk tetapi juga tidak begitu bagus, dapat dikatakan jumlah produksi tangkapan laut Jepang terjebak pada situasi yang stagnan yang berada pada angka 4.600-4800 ton saja setelah terjadinya krisis finansial pada 2008. Hal tersebut dapat dikatakan tidak menguntungkan bagi perdagangan Jepang, produksi cenderung mengalami penurunan, pada rentan tahun 2008-2015 Jepang mengalami penurunan produksi sebesar 16% (MAFF, 2019:1), tetapi yang dihasilkan cukup untuk memenuhi permintaan domestik terhadap produk tangkapan laut Jepang.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *Total Allowable Catch* (TAC). TAC adalah standar aturan yang diterapkan oleh *Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery of Japan* (MAFF) dan *Japan Fisheries Association* (JFA) mengenai jumlah total yang diperbolehkan bagi ekspor dan konsumsi domestik terhadap tangkapan ikan laut Jepang. Volume tangkapan laut yang diperbolehkan oleh TAC ditetapkan setiap tahunnya atas hasil yang disepakati oleh para nelayan dengan JFA (Kamoey, 2015:7).

4.3.1.2. Sektor Agrikultur Jepang

Pada sektor agrikultur, Jepang sangat terkenal dengan teknik serta skill agrikultur yang modern. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi, Jepang bisa saja memproduksi produk-produk agrikultur dengan jumlah yang besar. Sektor ini seakan memberikan Jepang jawaban atas kebutuhannya sebagai aktor perdagangan global untuk kembali menawarkan hasil-hasil produk agrikultur yang dihasilkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan terhadap permintaan produk agrikultur di pasar global, namun setelah terjadinya krisis berikut adalah perbandingan produksi agrikultur Jepang dalam kurun waktu 2008-2015.

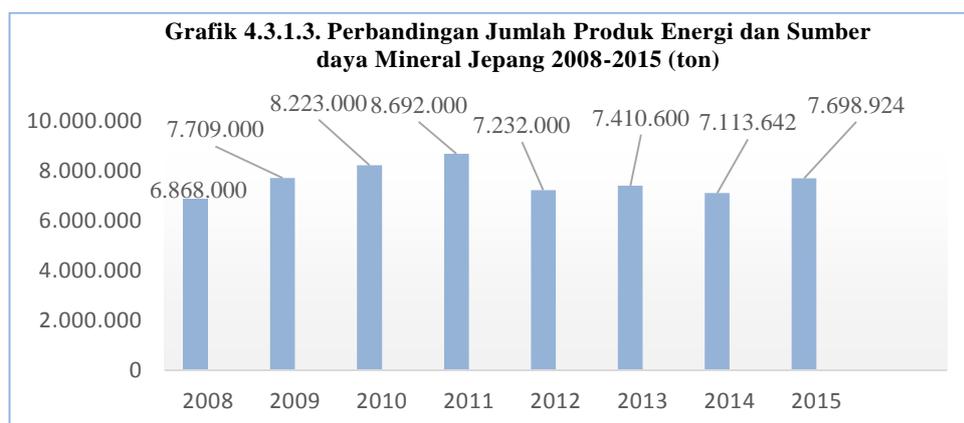


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jepang dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF), data telah diolah.

Berdasarkan data grafik jumlah produk agrikultur Jepang walaupun mengalami nilai produksi yang fluktuatif, akan tetapi produk yang dihasilkan oleh Jepang pada sektor agrikultur lebih besar dibandingkan pada sektor tangkapan lautnya setidaknya mengalami peningkatan 9% sejak 2008-2015 walau pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agrikultur merupakan salah satu sektor yang cukup diunggulkan oleh Jepang terutama dalam kerja sama perdagangan dengan Indonesia serta pada instrumen perjanjian NTBs (MAFF, 2019:1).

4.3.1.3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Jepang

Sesuai perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua negara sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang menjadi fokus kedua negara terlebih dalam produksinya yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, berikut adalah perbandingan jumlah produk pada sektor yang saat ini tengah menjadi fokus Indonesia dengan Jepang untuk mencapai *green economy*.



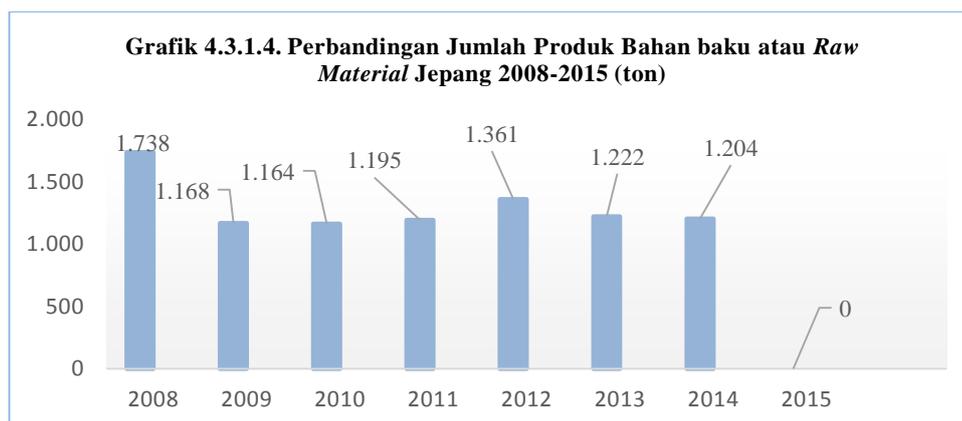
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jepang dan Ministry of Economic, Trade and Industry of Japan (METI), data telah diolah.

Data jumlah produk energi dan sumber daya mineral yang Jepang produksi mengalami fluktuasi hasil produksi. Dengan melihat tersebut penulis berpendapat bahwa fluktuasinya hasil produksi energi dan sumber daya mineral Jepang dipengaruhi oleh permintaan produk di pasar global terlebih Jepang yang sedang mengalami krisis finansil akan menjual produk ini dengan harga yang cukup mahal di pasar global. Sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2008-2015, yakni sebesar 15% (METI, 2019:1).

4.3.1.4. Sektor Bahan Baku atau *Raw Material* Jepang

Pada sektor terakhir dalam kesepakatan perdagangan Indonesia dengan Jepang, pada dasarnya sektor produk bahan baku atau *raw material* bukanlah produk unggulan bagi negara maju seperti Jepang akan tetapi produk ini akan

menjadi produk yang memiliki permintaan dari negara-negara yang tidak mampu atau tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dalam membuat suatu produk jadi menggunakan produk bahan baku ini. Berikut adalah grafik produk bahan baku atau *raw material* yang dimiliki oleh Jepang dalam rentan tahun 2008-2015.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jepang dan based on Ministry of Economic, Trade and Industry of Japan (METI) Current Production Survey, data telah diolah.

Dari data perbandingan jumlah produk bahan baku atau *raw material* yang Jepang produksi, tidak menunjukkan angka yang terus meningkat bahkan pada tahun 2015 tercatat bahwa Jepang tidak satupun memproduksi produk bahan baku atau *raw material*, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ini dari tahun 2008-2015 mengalami kegagalan peningkatan yang menyentuh persentase 0% (METI, 2019:1). Hal tersebut pada dasarnya merupakan hal yang masuk akal bagi negara maju yang telah memiliki teknologi untuk mengolah produk bahan baku, karena produk ini biasanya hanya di produksi dan di ekspor oleh negara-negara berkembang saja, argumen tersebut didukung dengan adanya pematihan teori merkantilis yang dipaparkan oleh Douglas A. Irwin dalam artikelnya yang berjudul *A brief History of International Trade Policy* (Irwin, 2001:1). Merkantilis menyatakan bahwa neraca perdagangan yang menguntungkan adalah neraca

perdagangan yang memiliki nilai ekspor yang melebihi nilai impor suatu negara, yang kemudian menghasilkan keseimbangan surplus perdagangan (Irwin, 2001:1).

Dengan memandang keadaan dunia saat ini serta perilaku negara dalam melakukan perdagangan khususnya pada sektor manufaktur dan bahan baku, Irwin justru menyatakan hal sebaliknya dari teori merkantilis, bahwa impor produk *raw materials* atau bahan baku lebih menguntungkan karena dapat membangun industri yang akan memperkuat ekonomi dan pertahanan nasional, sedangkan ekspor produk bahan baku (untuk digunakan oleh produsen asing) justru dianggap berbahaya dan mengancam industri domestik karena dapat memunculkan pesaing serta memberikan keuntungan lebih bagi produsen asing (Irwin 2001:1).

4.3.2. Perkembangan Ekspor Jepang

Perkembangan serta pertumbuhan ekspor Jepang tepatnya sejak tahun 2008-2015 mengalami peningkatan sebesar 1,5% secara stabil tiap kuartalnya, pertumbuhan ini lebih kuat dibanding rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2000. Walaupun adanya peningkatan yang stabil, ekspor Jepang juga pernah mengalami perubahan harga permintaan dipasar internasional. Hal tersebut didasari karena Yen pada tahun 2012 mengalami depresiasi yang berdampak pada harga produk Jepang yang relatif telah menurun sebanyak 13%, artinya dengan adanya hal tersebut Jepang harus meningkatkan daya saing produknya agar permintaan akan produk Jepang tetap meningkat (*Economic Bulletin, Issue 3, 2015:16-17*).

Adanya perubahan nilai tukar Yen pada 2012 hingga 2014, ada kemungkinan bahwa eksportir yaitu Jepang untuk menerapkan harga bagi produknya sendiri tanpa melihat harga produk sejenis di pasar global. Hal tersebut diberlakukan dengan alasan praktek khusus Jepang dalam pemberlakuan faktor

perdagangan. Faktur perdagangan biasanya dikenakan biaya lebih, karena adanya perhitungan jumlah penjualan dengan penghitungan biaya yang akan dibayarkan kemudian atau secara singkatnya adalah perhitungan prediksi yang akan dibayarkan. Biasanya dalam pembuatan faktur negara-negara eksportir memberikan bayaran lebih, namun dalam praktek Jepang, Jepang hanya mengambil sedikit biaya dalam pembuatannya sesuai nilai tukar negara pengimpor terhadap Yen.

Melihat perkembangan tersebut adanya perubahan nilai tukar yang berpengaruh terhadap ekspor Jepang ada pula faktor eksternal yang muncul yaitu dengan hadirnya Tiongkok dipangsa pasar global khususnya dipangsa pasar regional kawasan Asia-Pasifik sebagai pangsa pasar utama Jepang. Hal tersebut kemudian membuat penulis mencoba melihat posisi Indonesia dalam perdagangan dengan Jepang pada perkembangan ekspor Jepang. Pendapat penulis, perdagangan dengan Indonesia bukan merupakan perdagangan yang diprioritaskan oleh Jepang, untuk memperkuat argumen ini menurut *The Observatory of Economic Complexity* (OEC) dan *Ministry of Economic, Trade and Industry of Japan* (METI) bahwa hasil tangkapan laut adalah sektor terbesar Indonesia yang diekspor ke Jepang, sektor tersebut berhasil menyumbang 21% atau sekitar US\$ 8.3 juta bagi ekspor Indonesia ke Jepang, akan tetapi ternyata Indonesia bukan negara pengimpor hasil tangkapan laut terbesar bagi Jepang. Tiongkok dan Korea Selatan merupakan importir utama dan terbesar bagi Jepang pada sektor hasil tangkapan laut. Bagi Jepang, Tiongkok telah berhasil memberikan persentase hasil impor terbesar yakni, 6,2% atau sekitar US\$ 206 juta dan Korea Selatan 2,6% atau sekitar US\$ 82,9 juta sebesar pada sektor tangkapan laut, sedangkan Indonesia hanya memiliki 1,9% atau sekitar US\$ 61,5 juta saja bagi impor Jepang pada sektor hasil tangkapan laut (OEC,

2017:1). Untuk melihat posisi Indonesia pada perdagangan Jepang di kawasan Asia berikut adalah map sebaran persentase perdagangan Jepang di kawasan Asia.

Gambar 4.3.2. Persentase Perdagangan Jepang di Asia



Dari sebaran persentase perdagangan Jepang di Asia ternyata rekan dagang Jepang di Asia adalah Tiongkok, Korea Selatan dan Hong Kong, sedangkan Indonesia hanya menempati persentase total perdagangan sebesar 1,9% saja bersama dengan Malaysia dan Vietnam.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Sesuai atas hasil analisis yang telah dilakukan terhadap penurunan volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2008-2015. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa penurunan volume dan nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2008-2015, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor *terms of trade* adalah faktor yang berpengaruh paling signifikan dibandingkan dengan dua faktor lainnya, yaitu kondisi GDP riil Jepang serta dinamika pasar global terhadap perdagangan Indonesia dengan Jepang. Sesuai dengan hasil yang telah dipaparkan bahwa faktor ini berpengaruh secara signifikan akibat adanya beberapa fenomena yang juga mendukung menggerakkan pemerintah kedua negara untuk meresponnya melalui beberapa kebijakan baik domestik maupun internasional. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk merespon fenomena; *pertama*, fenomena lonjakan impor serta adanya *purchasing power* yang dimiliki kedua negara memaksa Indonesia menerapkan kebijakan *safeguard* untuk menahan lonjakan impor produk Jepang yang masuk sehingga tidak menyebabkan adanya *serious injury* bagi industri domestik, sedangkan bagi Jepang, untuk merespon hal tersebut pemerintah Jepang menerapkan kebijakan kenaikan pajak pendapatan dan pajak konsumsi sesuai dengan paket kebijakan ekonomi '*Abenomics*'. *Kedua*, fenomena *taper tantrum* atau rencana kebijakan kenaikan suku bunga yang diumumkan oleh bank sentral

Amerika Serikat, yaitu FED juga membuat beberapa negara mengalami apresiasi dan depresiasi nilai mata uang tanpa terkecuali Indonesia dan Jepang, hal tersebut yang kemudian memunculkannya *purchasing power* kedua negara yang menyebabkan adanya *balance of payment* bagi perdagangan Indonesia ke Jepang yang juga memaksa pemerintah Jepang untuk membatasi impor produk khususnya produk tangkapan laut melalui adanya aturan *total allowable catch* (TAC).

2. Kondisi GDP riil Jepang menjadi faktor yang cukup berpengaruh secara signifikan. Faktor ini dikatakan sebagai faktor yang cukup berpengaruh berdasarkan atas hasil analisis yang telah dilakukan, pada rentan waktu 2008-2015 Jepang memiliki kemampuan perekonomian domestik, namun pemerintah Jepang khususnya pada masa pemerintahan Abe membatasi kemampuan perekonomian khususnya masyarakat Jepang yang dimaksudkan agar masyarakat Jepang tidak menjadi masyarakat yang konsumtif terlebih dengan adanya paket kebijakan ekonomi '*abonomics*' hal tersebut juga ikut mendukung penurunan nilai dan volume ekspor perdagangan Indonesia ke Jepang pada rentan waktu 2008-2015.
3. Faktor yang ketiga yaitu faktor dinamika harga pada pasar global yang dipengaruhi oleh perubahan harga minyak dunia tidak begitu berdampak pada perdagangan antara Indonesia dengan Jepang terkhusus pada kebijakan NTBs. Turunnya harga minyak dunia sebesar 45% tidak berdampak signifikan bagi Indonesia dengan Jepang hal tersebut dilihat dari kedua negara yang sama-sama memiliki *purchasing power*.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian *Dampak Kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) terhadap Volume dan Nilai Ekspor Perdagangan Indonesia ke Jepang Tahun 2008-2015*, ada beberapa saran yang penulis berikan, sebagai berikut:

1. Melihat adanya dinamika pada *terms of trade* yaitu terapresiasinya mata uang kedua negara dalam keranjang mata uang dunia dan terjadinya peningkatan *purchasing-power* Indonesia dan Jepang. Pemerintah Indonesia yang menerapkan tindakan *safeguards* sudahlah tepat untuk mengurangi *serious injury*. Namun, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia dan Jepang tetap melakukan perdagangan dengan menekankan pada satu sektor yang diunggulkan dengan melihat kebutuhan serta permintaan baik dari sisi Indonesia maupun Jepang. Hal tersebut penulis sarankan agar aktifitas perdagangan dapat tetap berjalan dengan intens yang terfokus pada satu sektor unggulan yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi sehingga walaupun kedua negara memiliki *purchasing-power* yang sama tetap tidak menimbulkan lonjakan impor dan *serious injury* bagi perekonomian domestik.
2. Sudah saatnya bagi pemerintah kedua negara untuk kembali membahas masalah kerja sama kemitraan bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Penulis menyarankan untuk disegerakan melakukan *General Review of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GR-IJEPA)* serta dengan terjalinnya hubungan kerja sama Indonesia dengan Jepang selama 60 tahun, penulis menyarankan untuk kedua negara segera meningkatkan

kerja sama strategis kemitraan spesial (*special strategic partnership*) yang terfokus pada sektor perdagangan yang saat ini dibutuhkan oleh kedua negara, sehingga tidak terjadi lagi adanya stagnan perdagangan antara kedua negara. Adanya fenomena tersebut pula penulis menyarankan khususnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan tahapan serta membuat *guideline* kerja sama yang strategis sebelum terjalinnya kemitraan bilateral baik dengan Jepang dikemudian hari maupun dengan negara lain. Hal tersebut penulis sarankan agar dikemudian hari kejadian seperti kasus perdagangan antara Indonesia dengan Jepang tidak terulang lagi, serta dapat mempermudah pemerintah dalam mengontrol progres kerja sama dalam mencapai kepentingan bersama.

3. Pemerintah kedua negara sudah selayaknya saling melakukan eksplorasi kerja sama serta perluasan cakupan sektor kerja sama. Maraknya sektor ekonomi digital, dapat mendorong pemerintah Indonesia menjalin kerja sama yang berbasis pada ekonomi digital dengan pemerintah Jepang, yang kemudian diaplikasikan bagi peningkatan skill serta nilai produk UKM. Hal ini dirasa tepat, terlebih dengan terbuktinya Jepang yang sukses mengembangkan sektor ekonomi digitalnya yang berasal dari UKM untuk membangun perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adams, F. Gerald, *et al.* (2007). *Accelerating Japan's Economic Growth*. USA: Routledge.
- Beasley, Ryan K., *et al.* (2013). *Foreign Policy in Comparative Perspective*. USA: CQ Press.
- Bryman, Alan. (2012). *Social Research Methods 4th Edition*. New York: Oxford University Press.
- Coughlin, Cletus C., dan Wood, Geoffrey E. (1989). *An Introduction to Non-Tariff Barriers to Trade*.
- Deardorff, Alan V., dan Robert M. Stern. (1998). *Measurement of Non-tariff Barriers: Studies in International Economics*. Ann Arbor MI: University of Michigan Press.
- Deardorff, Alan V. (2006). *Glossary of International Economics*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd: University of Michigan Press.
- Dominick, Salvatore. (2013). *International Economics*. United States: WILEY.
- Dunne, Tim, Milja Kurki dan Steve Smith. (2013). *International Relations Theories*. UK: Oxford Press.
- Gnos, Claude dan Louis Philippe Rochon. (2008). *The Keynesian Multiplier*. USA: Routledge.
- Goldstein, Joshua S., dan Jon V. Pevehouse. (2014). *International Relations*. New Jersey: Pearson.
- Fugazza, Marco. (2013). *The Economics Behind Non-Tariff Barriers: Theoretical Insights and Empirical Evidence*. UNCTAD: Geneva.
- Hanson, David. (2010). *Limits to Free Trade: Non-Tariff Barriers in the European Union, Japan and United States*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

- Harvey, David. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. USA: Oxford University Press.
- Hayes, Louis D. (2012). *Political Sytem of East Asia: China, Korea and Japan*. USA: Routledge.
- Mietzner, Marcus. (2009). *Indonesia in 2008: Yudhoyono's Struggle for Reelection*. USA: University of California Press.
- Mintz, Alex, dan Karl DeRouen Jr. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. UK: Cambridge University Press.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. USA: Sage Publications, Inc.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*. UK: Pearson Education Inc.
- Spero, Joan E., dan Jeffry A. Hart. (2010). *The Politics of International Economic Relations*. Wadsworth. Boston.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. (2012). *International Relations Theory*. UK: Pearson Education Inc.
- Wallace, William. (1971). *Foreign Policy and The Political Process*. UK: Macmillan Education.

Jurnal, Penelitian dan Data Report:

- Anwar, Dewi Fortuna. (2010). *The Impact of Domestic and Asian Regional Changes of Indonesia Foreign Policy*. Institute of Southeast Asian Studies: Southeast Asian Affairs.
- Bank for International Settlements. (2006). *Quarterly Review: Estimation of Asian Effective Exchange Rates: a Technical Note No. 217*.
- Basri, M. Chatib dan Sjamsu Rahardja. *The Indonesian Economy Amidst the Global Crisis: Good Policy and Good Luck*. ASEAN Economic Bulletin, Vol 27, 1 April 2010.
- Bellot, Judith Hippler. *The Tokyo Round and Beyond (Review Essay)*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.1986.
- Chin, Lee. (2015). *The Determinants of Non-Tariff Barriers*. Int. Journal of Economics and Management 9 (1): 155-175.
- Dahar, Darmiati et al. (2014). *Analisis Pemberlakuan Non Tariff Barriers (NTBs) Pada Ekspor Hortikultural Indonesia ke ASEAN +3*.

- Daly, Michael dan Sergios Stannas. (2001). *Tariff and Non-Tariff Barriers to Trade in Korea*.
Economic Bulletin 2015 Issue 3.
- Goto, Akira, *Technology Policies in Japan: 1990 to the Present*. Diakses pada 13:01 20 Januari 2019 <https://www.nap.edu/read/12194/chapter/4>
- Hakim, Dedi Budiman *et al.* (2014). *Analisis Pengaruh Non-Tariff Barriers Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol. 3 No. 2
- Harriden, Jessica. (2012). *Japan's Relations with Southeast Asia: The Fukuda Doctrine and Beyond*. London: Routledge.
- Hideaki, Shiroyama, *The Development of Digital Government and Public Services Reform in Japan*. Diakses pada 11:45 20 Januari 2019 https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/fy2018/tff2018_s4_03.pdf
- Ikbal, Mohd. (2016). *Evolution of Japanese ODA 1945-2015: An Analysis*. National University of Malaysia.
- Japan Ministry of Economy, Trade and Industry. External Economic Policy: Trade Policy Index: EPA/FTA/IIA yang diakses pada laman http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/epa_en/id/ 22 April 2017 pukul 01:16 WIB
- Kayani, Uzair J., dan Sikander A. Shah. (2014). *Non-Tariff Barriers and Pakistan's Regional Trade: A Legal and Economic Analysis of Non-Tariff Barriers in Pakistan, India, China and Sri Lanka*.
- Lingga, Immanuel, *et al.* (2012). *IJ-EPA dan Implikasinya terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia-Jepang*. Dipublikasi dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6 No. 1.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia <https://kkp.go.id/kategori-infografis/1> diakses pada 14 Mei 2018 pukul 14:00 WIB.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <http://www.kemendag.go.id/id/faq#f-1>, diakses pada 21 April 2017 pukul 16:01 WIB.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Statistik data: Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang dengan Jepang periode 2013 hingga 2016 yang diakses pada <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111> 22 April 2017 pukul 00:26 WIB.

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Laporan Akhir: Analisis Kesiapan Indonesia dalam Penerapan Safeguard Barriers Pada Perdagangan Jasa Internasional*. Puska KPI, BPPKP, Kemendag. Jakarta.
- Lu, Zheng, *et al.* (2017). *EU-China Economic Relations: Interactions and Barriers*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 83435
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan
<http://www.maff.go.jp/e/> diakses pada 22 Januari 2019 pukul 14:58 WIB.
- Ministry of Economic, Trade and Industry of Japan
<https://www.meti.go.jp/english/> diakses pada 23 Januari 2019 pukul 07:15 WIB.
- National Institute of Population and Social Security Research. (2002). *Populations Projections for Japan: 2001-2050*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Trade Policy Studies. (2005). *Looking Beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade*. Secretary-General of OECD.
- Rayadiani, Sefiani dan Silvi Mustikawati. (2016). “*Daya Saing Produk Ekspor Indonesia di Pasar Jepang Periode Pra dan Pasca IJ-EPA*”. *Warta Pengkaji Perdagangan*. Vol. III, No. 12.
- Rehman, Nadia. (2013). “*Non Tariff Barriers to Trade Normalization Between India and Pakistan*”. Dalam *Trade Development Authority of Pakistan*.
- Saptanto, Subhechanis *et al.* (2017). *Impact of Non-Tariff Barriers of Macroeconomics Performance of Fisheris Sector Using Gtap Model Approach*. Jakarta Utara: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Sugianto, Romi, (2017). *Fluktuasi Ekspor Udang Indonesia ke Jepang Tahun 2010-2014*.
- Sunorita, Melisa. (2013). *Kebijakan Hambatan Non-Tariff di Pasar Uni Eropa Terhadap Ekspor Komoditas Udang Indonesia*.
- Spohr, Alexandre Piffero dan André Luiz Reis da Silva. (2017). *Foreign Policy's Role in Promoting Development: the Brazilian and Turkish Cases*. *Contexto Internacional*. Vol. 39(1).
- Vinokurov, Evgeny *et al.* (2016). *Non-Tariff Barriers and Technical Regulations*. International Institute for Applied Systems Analysis.
- The International Association for the Protection of Intellectual Property. *Summary Report Question Q191: Relationship between Trademarks and Geographical Indications*.
- World Bank Data. (2019). *The Pink Sheet*.

World Trade Organization (WTO). *Agreement on Safeguard*. Diakses pada laman https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#lAgreement 23 April 2017 pukul 11:33 WIB

World Trade Organization (WTO). *Agreement on Safeguard*. Diakses pada laman https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_01_e.htm#article2A1 23 April 2017 pukul 12:18 WIB

Yoshino, Naoyuki, dan Farhad Taghizadeh-Hesary. (2015). “*An Analysis of Challenges Faced by Japan’s Economy and Abenomics – The Japanese Political Economy*, 40: 37-62”. Routledge

Artikel

CNN Business. (2017). “*Debt, old age, stagnation: Japan’s economy faces huges challenges*”. Dilansir dalam CNN Bisnis, edisi 20 Oktober 2017 dalam laman <https://money.cnn.com/2017/10/20/news/economy/japan-economy-election-abenomics/index.html> pada 13 Juni 2019 pukul 20:10 WIB.

Irwin, Douglas A. (2001). “*A Brief History of International Trade Policy*”. Dilansir dalam *The Library of Economics and Liberty*, edisi 26 November 2001 dilaman <https://www.econlib.org/library/Columns/Irwintrade.html> pada 15 Juni 2019 pukul 01:11 WIB.

Phadnis, Aditi, dan Kashif Hussain. (2011). “*India-Pakistan Trade: India tackles Non-Tariff Barriers head-on*”. Dilansir dalam *The Express Tribune*, edisi 30 September 2011 dalam laman <https://tribune.com.pk/story/263394/india-pakistan-trade-india-tackles-non-tariff-barriers-head-on/> pada 21 Juni 2018 pukul 09:30 WIB.

Tempo.co. (2011). “*Di Tokyo, SBY Menyebut Empat Kunci Indonesi-Jepang*”. Dilansir dalam Tempo.co, Edisi Jumat, 17 Juni 2011 dalam laman <https://nasional.tempo.co/read/341472/di-tokyo-sby-menyebut-empat-kunci-indonesia-jepang> pada 15 April 2019 pukul 11:10 WIB.

The Diplomat. (2018) “*After the Presidential Election, What Next for Abe and the LDP?*”. Dilansir dalam *the Diplomat*, Edisi 23 September 2018 dalam laman <https://thediplomat.com/2018/09/after-the-presidential-election-what-next-for-abe-and-the-ldp/> pada 14 Januari 2019 pukul 14:50 WIB.

The Diplomat. (2014). “*Japan Consumption Dilemma*”, Edisi 4 Juli 2014 dalam laman <https://thediplomat.com/2014/07/japans-consumption-dilemma/> pada 17 Januari 2019 pukul 15:22 WIB.

The Jakarta Post. (2018). “*Japan FM’s visit highlights ASEAN’s industrial hub, Indo-Pacific and South China Sea*”. Edisi 25 Juli 2018 dalam laman <https://www.thejakartapost.com/news/2018/06/25/japanese-fms-visit-highlights-aseans-industrial-hub-indo-pacific-and-south-china-sea.html> pada 20 Mei 2019 pukul 2:22 WIB.

Dokumen:

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP).

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). (2015). IAP Summary for Indonesia.

Agreement between Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnership. (2007).

Bank of Japan. (2015). Statement on Monetary Policy.

Common Effective Preferential Tariff Scheme (CEPT Skema).

European Commission, Directorate-General for Trade “European Union, Trade Goods with China”.

Indian Council for Research on International Economic Relations “Working Paper 363, August 2018”.

UNCTAD “Non-Tariff Barriers to Trade: Economic and Policies Issues for Developing Countries”.

World Bank Publications Document. Indonesia Economic Quarterly. (2018).

World Bank Group Publications. The Great Plunge in Oil Prices: Causes, Consequences and Policy Responses. (2015)

Situs Online:

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI
<http://treaty.kemlu.go.id>

European Union Law <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Indonesia National Trade Repository <http://intr.insw.go.id/ntm.php>

Japan External Trade Organization (JETRO)
https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/section3/page7.html

Japan International Cooperation Agency <http://www.pma-japan.or.id/>

Japan Statistics Bureau <http://www.stat.go.jp/english/index.html>

The Japan Times <https://www.japantimes.co.jp/>

The Observatory of Economic Complexity <https://atlas.media.mit.edu/en/>

World Trade Organization <https://www.wto.org/>